



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 57 TAHUN 2015

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur adalah dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah dicapai;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Indikator Kinerja Utama di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 812, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Keputusan Presiden Nomor 137/P Tahun 2013 tentang Pengangkatan DR. H. Awang Faroek Ishak, M.M, M.Si sebagai Gubernur Kalimantan Timur dan HM. Mukmin Faisyal HP., S.H. sebagai Wakil Gubernur Kalimantan Timur masa Jabatan Tahun 2013-2018;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 31);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 32);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 33);
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 34);
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 35) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Provinsi

Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2012 Nomor 8);

16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 10 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014 Nomor 10);

17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 66);

Memperhatikan: Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubenur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
5. Kinerja Instansi Pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.
6. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan.
7. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.
8. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran sebagian atau seluruhnya dari APBN dan atau APBD.

9. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut.
10. Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis.

BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Penetapan indikator kinerja utama bertujuan :

- a. untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan
- b. untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Pasal 3

Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi dan SKPD sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III PENGUNAAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal 4

Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi digunakan oleh SKPD untuk :

- a. perencanaan jangka menengah;
- b. perencanaan tahunan;
- c. penyusunan dokumen Perjanjian Kinerja;
- d. pelaporan kinerja;
- e. evaluasi kinerja instansi pemerintah; dan
- f. pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan.

BAB IV PEMBINAAN, KOORDINASI DAN PENGAWASAN

Pasal 5

- (1) Pembinaan atas pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dilakukan oleh Biro Organisasi.
- (2) Koordinasi atas dokumen perencanaan kinerja setiap SKPD terhadap pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dilakukan oleh Bappeda.

- (3) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dilakukan oleh Inspektorat.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 5 Oktober 2015

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 5 Oktober 2015

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. RUSMADI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2015 NOMOR 57.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SUROTO, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19620527 198503 1 006

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

VISI : MEWUJUDKAN KALTIM SELAJUTERA YANG MERATA DAN BERKEADILAN BERBASIS AGROINDUSTRI DAN ENERGI RAMAH LINGKUNGAN

- MISI :
1. Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia Kalimantan yang Mandiri dan Berdaya Saing Tinggi
 2. Mewujudkan Daya Saing Ekonomi yang Berkelestarian Berbasis Sumber Daya Alam dan Energi Terbarukan
 3. Mewujudkan Infrastruktur Dasar yang Berkualitas bagi Masyarakat secara Merata
 4. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, dan Berorientasi pada Pelayanan Publik
 5. Mewujudkan Kualitas Lingkungan yang Baik dan Sehat serta Berperspektif Perubahan Iklim

- TUJUAN :
1. Meningkatkan kualitas SDM Kaltim
 2. Meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pendapatan masyarakat
 3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi hijau
 4. Menyediakan infrastruktur dasar yang berkualitas
 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik
 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Alasan	Sumber Data	Cara Perhitungan	Penanggung Jawab
1.	Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia	1 IPM	Skor / Indeks				Disdik, Diskes, Ekonomi, Dinsos, Disnaker
2.	Meningkatnya Angka Melekat-huruf	2 Angka Melekat-Huruf (%)	Persentase	Mengacu pada indikator kinerja utama Renstra Kemdikbud dan tujuan MDGs	BPS Prov. Kaltim	Angka melekat huruf didapat dengan membagi jumlah penduduk usia 15 tahun keatas yang dapat membaca dan menulis dengan jumlah penduduk usia 15 tahun keatas kemudian hasilnya dikalikan dengan seratus.	DinasPendidikan
3.	Meningkatnya rata-rata lama sekolah	3 Angka rata-rata sekolah (tahun)	Tahun	Mengacu pada indikator kinerja utama Renstra Kemdikbud dan tujuan MDGs	BPS Prov. Kaltim	Lamanya bersikolah dapat dikonversikan langsung dari jenjang pendidikan dan kelas tertinggi yang pernah diduduki seseorang, misalnya jika seseorang pendidikan tingginya adalah SMP kelas 2, maka ia memiliki jumlah tahun bersikolah sama dengan 8 tahun, yaitu 6 tahun bersikolah di tingkat SD ditambah dengan 2 tahun di SM	DinasPendidikan
4.	Meningkatnya angka harapan hidup	4 Angka harapan hidup (tahun)	Tahun	Angka Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Angka Harapan Hidup yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan.	BPS	idealnya Angka Harapan Hidup dihitung berdasarkan Angka Kemalian Menurut Umur (Age Specific Death Rate/ASDR) yang datanya diperoleh dari catatan registrasi kematian secara bertahun-tahun sehingga dimungkinkan dibuat Tabel Kematian.	DinasKesehatan
5.	Meningkatnya pendapatan perkapita	5 Pendapatan perkapita (juta rupiah)	Juta Rupiah				Ekonomi, BPPMD
6.	Menurunnya tingkat kemiskinan	6 Tingkat kemiskinan (%)	Persentase				DinasSosial

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Alasan	Sumber Data	Cara Perhitungan	Penganggung Jawab
7.	Menurunnya tingkat pengangguran	7 Tingkat Pengangguran (%)	Persentase				Dinas Tenaga Kerja
8.	Meningkatnya daya beli masyarakat	8 Tingkat inflasi (%)	Persentase				Tim Pengabdilifiasi Daerah
		9 Paritas daya beli / PPP (Rp)	Rp.				Dinso, Disnaker
9.	Menurunnya Indeks Gini	10 Indeks Gini	Skor / Indeks				Ekonomi, Dinso
10.	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	11 Pertumbuhan ekonomi dengan migas(%)	Persentase	Mengukur Pertumbuhan Ekonomi Daerah	BPS	$\frac{(T_{sk} - T_{sb})}{T_{sb}} \times 100\%$	Disperindagkop
		12 Pertumbuhan ekonomi tanpa migas (%)	Persentase	Mengukur Peran Migas dalam pertumbuhan ekonomi daerah	BPS	$\frac{(T_{sk} - T_{sb})}{T_{sb}} \times 100\%$	Disperindagkop
		13 Pertumbuhan ekonomi non migas dan non batubara	Persentase	Mengukur Peran Migas dan Batubara dalam Pertumbuhan Ekonomi daerah	BPS	$\frac{(T_{sk} - T_{sb})}{T_{sb}} \times 100\%$	Disperindagkop
11.	Meningkatnya kontribusi sektor pertanian dalam arti luas	14 Kontribusi sektor pertanian dalam artluas (%)	Persentase				Dishut, Disan, Disbun, Disperindagkop
12.	Tercapainya swasembada pangan	15 Rasio pemenuhan beras (%)	Persentase	Bila kebutuhan konsumsi = ketersediaan beras maka swasembada beras tercapai, karena kebutuhan konsumsi dapat dipenuhi dari ketersediaan beras dalam daerah sendiri.	Sumber data = Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan (BKPP)	Rasio Pemenuhan Beras = (kebutuhan konsumsi / ketersediaan beras) * 100%	Dinas Pertanian
		16 Saunan energi baru terbarukan (%)	Persentase	Mengukur pemanfaatan sumber energi baru dan terbarukan (EBT)	Laporan Semester/Tahunan PT. PLN, Disamben	$\frac{\text{Jml Daya Terpasang yg bersumber EBT}}{\text{Jml Daya Terpasang}} \times 100\%$	Disamben, PLN dan Swasta
14.	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan infrastruktur dasar	17 Indeks kepuasan layanan infrastruktur dasar	Skor / Indeks				Dinas PU, Dinas Pertumbuhan
		18 Indeks Persepsi Korupsi	Skor / Indeks				Biro Organisasi
		19 Opini BPK	Opini				Biro Keuangan
16.	Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik	20 Indeks Kepuasan Masyarakat	Skor / Indeks	Mengukur kemampuan organisasi dalam memberikan layanan kepada masyarakat untuk menerapkan pelayanan publik yang baik	- Laporan dari unit layanan - Laporan peningkatan kualitas layanan	Survey Indeks Kepuasan Masyarakat	Biro Organisasi
		21 Predikat Akuntabilitas Kinerja	Predikat	Mengukur keberhasilan penerapan SAKIP di Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur	Laporan Hasil Evaluasi (LHE) dari Kementerian PAN dan RB	Sesuai dengan Bobot dari Hasil Laporan Evaluasi (LHE)	Biro Organisasi
17.	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja	22 Predikat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Predikat	Hasil Evaluasi LPPD dijadikan dasar untuk melakukan pembinaan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	3-4 = Sangat Tinggi 2-3 = Tinggi 1-2 = Sedang 0-1 = Rendah	Biro Pemerintahan Umum

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Asasan	Sumber Data	Cara Perhitungan	Penanggung Jawab
18.	Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan	23 Indeks Kualitas Lingkungan	Skor / Indeks	Mengukur tingkat pelayanan badan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur kepada Masyarakat dengan meningkatkan ketersediaan Infrastruktur baik secara kualitas maupun kuantitas yang lebih difokuskan kepada pengelolaan SDA serta perbaikan kualitas lingkungan	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) = Jumlah Indeks Pencemaran Air (IPA) + Indeks Pencemaran Udara (IPU) + Indeks Tutupan Hutan / Lahan (PTH) dibagi 3 $\frac{IPA + IPU + ITH}{3}$	BLH, Kehutanan, Perkebunan, Disamben
19.	Menurunnya tingkat emisi gas rumah kaca	24 Intensitas Emisi (ton CO2/PDRB US \$ juta)	ton CO2/PDRB US \$ juta	Mengukur intensitas emisi dari gas rumah kaca	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan	Emisi BAU/ Emisi Aktual	BLH, Kehutanan, Perkebunan, Disamben

1. Nama Unit Organisasi : **Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur**

2. Tugas : Membantu Gubernur dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi, tataaksana dan kepegawaian serta memberikan pelayanan administratif kepada seluruh Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur

3. Fungsi :
1. Pengkoordinasian dan perumusan kebijaksanaan daerah sesuai rencana pembangunan daerah yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah Provinsi.
 2. Penyusunan kebijakan pemerintahan daerah.
 3. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah.
 4. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah.
 5. Pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah.
 6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Indikator Kinerja Utama :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Alasan	Sumber Data	Cara Perhitungan	Penanggung Jawab
1.	Tersusunnya LPPD	1 Predikat LPPD	Predikat	- Hasil Evaluasi LPPD dijadikan dasar untuk melakukan pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi - Memotivasi daerah lebih meningkatkan kinerja dalam kapasitas sebagai pelayan publik	- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan pemerintahan Daerah kepada masyarakat (pasal 3 ayat 2) - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	3<ST<4=Sangat Tinggi, 2<T<3=Tinggi, 1<S<2=Sedang, 0<R<1=Rendah	Biro Pemerintahan Umum

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Alasan	Sumber Data	Cara Perhitungan	Penanggung Jawab
2.	Terselenggaranya SIAK dan NIK Nasional	2 Presentase administrasi kependudukan kab/kota yang memenuhi kategori lebih dari atau sama dengan " Baik"	Persentase	Meningkatkan penyelenggaraan kependudukan kab/kota dalam rangka terb administrasi kependudukan motivasi	1. Quisioner ke dinas kependudukan dan pencatatan sipi kab/kota 2. Monitoring ke lapangan	Pembobotan penilaian : 1 Rumusan penghitungan kriteria utama (75%) : Bobot = 75% nilai masing-masing variabel 40 - 100 Nilai x bobot = nilai akhir 2 Rumusan penghitungan kriteria penunjang : Bobot = 25% nilai masing-masing variabel 40 - 100 nilai x bobot = nilai akhir 3 Kategori 80 keatas = Sangat Baik 70 - 80 = Baik 61 - 70 = Sedang 50 - 60 = kurang	Biro Hukum
3.	Terwujudnya produk hukum daerah yang sesuai dengan norma/azas HAM	4 Jumlah produk hukum yang ditetapkan	dokumen	Mengukur produk hukum yang dihasilkan tidak melanggar norma dan azas HAM sehingga dalam pelaksanaannya tidak menimbulkan konflik dan keresahan dalam masyarakat.	Jumlah Produk Hukum yang telah ditetapkan dan didokumentasikan	Jumlah produk hukum yang masuk $\times 100\%$ Jumlah produk hukum yang diselesaikan	Biro Hukum
4.	Terwujudnya bantuan hukum dan aparat/ masyarakat sadar hukum dalam penegakan HAM	5 Prosentase penyelesaian advokasi / Bantuan Hukum	Persentase	Mengukur gugatan senketa yang terjadi antara Pemerintah dengan masyarakat/pihak lain yang masuk dalam ranah hukum serta Masih rendahnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat berkaitan dengan HAM sehingga sering terjadi pelanggaran hukum yang berdampak pada masyarakat oleh Pemerintah maupun oleh masyarakat.	Laporan penyelesaian advokasi/bantuan hukum yang telah dilakukan	Jumlah Perkara yang diselesaikan $\times 100\%$ Jumlah perkara yang masuk	

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Alasan	Sumber Data	Cara Perhitungan	Penanggung Jawab
5.	Meningkatnya kerjasama antar daerah	6 Jumlah perjanjian kerjasama (MOU)	MoU	Mengukur tingkat kepuasan masyarakat dalam pelayanan administrasi khususnya dalam pembuatan MOU dan surat izin perjalanan dinas ke luar negeri	RENSTRA BIRO 2013 - 2018 Himpunan Perjanjian Kerjasama	Jumlah Perjanjian kerjasama (MoU) yang terrealisasi	Biro Kerjasama dan Perntaan Wilayah
6.	Meningkatnya kepastian batas wilayah antar kab/kota dan provinsi	7 Jumlah Penegasan Titik Batas	PBU	Mengukur keberhasilan fasilitasi dan penyelesaian sengketa batas wilayah serta mengukur jumlah PBU yang telah terpasang	RENSTRA BIRO 2013 - 2018 Katalog Tapal Batas	Jumlah Berita Acara kesepakatan yang ditandatangani	
7.	Terwujudnya pelayanan administrasi dan koordinasi perencanaan pembangunan pembangunan secara maratap	8 prosentase program/ kegiatan yang sesuai rencana	Persentase				Biro Pembangunan Daerah
8.	Terwujudnya pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui ULP	9 Jumlah lelang yang dilakukan melalui LPSE	Lelang	Fungsi Biro Bangda sesuai dengan Pergub Kaltim No.37 Tahun 2013		Lelang Barang/Jasa + Lelang Konsultansi + Lelang Konstruksi + Lelang Jasa Lainnya	
		10 Berkurangnya pengadaan lelang	Persentase	Fungsi Biro Bangda sesuai dengan Pergub Kaltim No.37 Tahun 2013		$Y = X_{n+1} < X_n$	
9.	Terwujudnya koordinasi bidang perekonomian	11 Nilai inflasi daerah	Nilai	Mengukur laju pertumbuhan inflasi di daerah	- Data Bank Indonesia - Data BPS - Data inflasi dari Kab/Kota - Instruksi Mendagri No. 027/1696/SJ tentang Menjaga keterjangkauan barang dan jasa di daerah	Inflasi di Kota Balikpapan, Kota Samarinda, Kabupaten Paser dan Kabupaten Penajam Paser Utara	Biro Perekonomian
10.	Terwujudnya kualitas koordinasi bidang kesejahteraan rakyat	12 Menurunnya Tingkat Kemiskinan	Persentase	Mengukur kinerja Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan tugas koordinasi penanggulangan kemiskinan dan pengendalian pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan daerah	Buku rencana aksi kemiskinan provinsi Kalimantan timur 2013 - 2018 Buku Evaluasi penanggulangan kemiskinan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013	Survei Sosial ekonomi Nasional (susenas) yang dilaksanakan oleh BPS	Biro Sosial

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Alasan	Sumber Data	Cara Perhitungan	Penganggung Jawab
11.	Terwujudnya pelayanan humas dan protokol secara internal dan eksternal yang berkualitas	13 Prosentase penurunan berita negatif	Persentase				Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
12.	Terwujudnya organisasi tataaksana dan pendayagunaan aparatur yang profesional, rasional, efektif, efisien dan akuntabel	14 Skor IKM rata2 unit pelayanan	Skor	Mengukur kemampuan organisasi dalam memberikan layanan kepada masyarakat untuk menerapkan pelayanan publik yang baik	- Laporan dari unit layanan - Laporan peningkatan kualitas layanan	Survey IKM	Biro Organisasi
		15 Nilai Akuntabilitas Provinsi	Nilai	Mengukur keberhasilan penerapan SAKIP di Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur	Laporan Hasil Evaluasi (LHE) RB Kementerian PAN dan RB	Sesuai dengan Bobot dari Hasil Laporan Evaluasi (LHE)	
13.	Terwujudnya Laporan Keuangan yang berkualitas	16 Opini terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah oleh BPK	Opini	Mengukur Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi	Hasil Audit BPK	1. Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan 2. Penilaian atas keandalan sistim pengendalian intern yang berdampak material terhadap laporan keuangan 3. Penilaian Terhadap Penyajian atas Laporan Keuangan secara keseluruhan	Biro Keuangan
		17 Ketepatan waktu	Tepat/Tidak	Mengukur Ketepatan Penyusunan APBD	Dokumen APBD	Ketepatan Waktu Penyusunan APBD paling lambat Per 31 Desember	

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Alasan	Sumber Data	Cara Perhitungan	Penanggung Jawab
14.	Terpenuhinya kebutuhan aset	18 Prosentase aset yang masuk neraca daerah 19 Prosentase pengadaan aset melalui SIMBADA	Persentase Persentase				Biro Perencanaan
15.	Terwujudnya pelayanan pengelolaan administrasi umum	20 Indeks ketepatan waktu pelayanan administrasi keuangan	Indeks				Biro Umum

1. Nama Unit Organisasi : **Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur**
2. Tugas : Melaksanakan, merumuskan, mengkoordinasikan, administrasi umum, keuangan, persidangan, dan hubungan masyarakat serta menyediakan tenaga ahli DPRD.
3. Fungsi :
 1. Perumusan kebijakan kesekretariatan sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
 2. Pengkoordinasian, perencanaan, administrasi umum, keuangan, persidangan, dan hubungan masyarakat.
 3. Pembinaan dan pengendalian administrasi umum, keuangan, persidangan, dan hubungan masyarakat.
 4. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli.
 5. Pelaksanaan pembinaan dan pengendalian kelompok jabatan fungsional dan tenaga ahli.
 6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

4. Indikator Kinerja Utama :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Alasan	Sumber Data	Cara Perhitungan	Penanggung Jawab
1.	Meningkatkan Kelancaran Pelaksanaan Rapat-rapat DPRD	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase Rapat Sesuai dengan Jadwal yang Ditentukan 2. Persentase Rapat yang Sesuai Standar 	Persentase	Untuk mengukur tingkat kepuasan terhadap pelayanan Sekretaris Dewan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Caturwulan 2. Data dari Bagian Persidangan Sekretariat Dewan 	Jumlah Rapat yang Ada / Jumlah Rapat Sesuai Jadwal x 100 %	Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur
2.	Mewujudkan Proses Legislasi, Penganggaran dan Pengawasan dengan tepat waktu melalui penyediaan data yang berkualitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase Raperda yang diputuskan 2. Penetapan APBD yang Tepat Waktu yang Sesuai dengan Permendagri No. 37 Tahun 2014 	Persentase	Untuk mengukur sampai sejauh mana Anggota Dewan telah melaksanakan tugas dan fungsi Dewan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Caturwulan & Perundangan Sekretariat Dewan 2. Data dari Bagian Hukum Sekretariat Dewan 	Jumlah Raperda yang Ditetapkan / Jumlah Raperda yang Diusulkan x 100 %	
		<ol style="list-style-type: none"> 3. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Audit BPK RI dan DPRD 4. Jumlah Rekomendasi Dismampaikan Kepada SKPD 	Persentase		<ol style="list-style-type: none"> 1. Data dari Bagian Persidangan Sekretariat Dewan 2. Data dari Bagian Keuangan Sekretariat Dewan 	Tindak Lanjut DPRD / Hasil Audit BPK RI x 100 %	Jumlah Permasalahan yang telah Direkomendasi / Jumlah Permasalahan yang perlu Direkomendasi x 100 %

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Alasan	Sumber Data	Cara Perhitungan	Penanggung Jawab
		5 Jumlah Perda yang Di Review Kepada SKPD	Perda		Data dari Bagian Persidangan Sekretariat Dewan	Jumlah Perda yang telah Di Review / Jumlah Perda yang akan Di Review x 100 %	
3.	Meningkatkan Pelayanan Penyaluran Aspirasi Masyarakat	1. Persentase Aspirasi yang Ditindaklanjuti	Persentase	Untuk mengukur sejauh mana Sekretariat Dewan Aspirasi Masyarakat ke Dewan untuk ditindaklanjuti	1. Laporan Caturwulan 2. Data dari Bagian Data dari Bagian Hubungan Masyarakat (Humas) Sekretariat Dewan	Jumlah Aspirasi yang Ditindaklanjuti Dewan / Jumlah Aspirasi yang Ada x 100 %	
4.	Meningkatkan Kecukupan Sarana dan Prasarana	1. Rasio Kecukupan Sarana dan Prasarana	Persentase	Untuk mengetahui apakah sarana dan prasarana yang tersedia sudah sesuai dalam memfasilitasi tupoksi Dewan	1. Data dari Subbag Urusan Dalam dan Rumah Tangga 2. Data dari Subbag Penyusunan Program Sekretariat Dewan	Sarana dan Prasarana yang dibutuhkan / Sarana dan Prasarana yang ada x 100 %	
5.	Meningkatkan Pengelolaan Administrasi	1. Persentase Laporan yang Terbit Tepat Waktu	Persentase	Untuk mengetahui sampai sejauh mana Sekretariat Dewan menindaklanjuti Tupoksi Dewan	1. Data dari Bagian Umum Sekretariat Dewan 2. Data dari Bagian Keuangan Sekretariat Dewan	Jumlah Laporan yang Ada / Jumlah Laporan yang Terbit Tepat Waktu x 100 %	

1. Nama Unit Organisasi : Dinas Pendidikan
2. Tugas : melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pendidikan berdasarkan atas otonomi dan tugas pembantuan.
3. Fungsi :
 1. Perumusan kebijakan teknis bidang pendidikan sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah;
 2. Perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang pendidikan;
 3. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis pendidikan taman kanak-kanak, sekolah dasar dan sekolah luar biasa;
 4. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis pendidikan sekolah menengah pertama dan sekolah menengah umum;
 5. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis pendidikan sekolah menengah kejuruan dan pendidikan tinggi;
 6. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis pendidikan non formal dan informal;
 7. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
 8. Pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 9. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;
 10. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Indikator Kinerja Utama :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Alasan	Sumber Data	Cara Perhitungan	Penanggung Jawab
1.	Meningkatnya akses dan pemerataan pendidikan pada jenjang pendidikan di Kalimantan Timur	1. Angka buta aksara penduduk usia 15-24 tahun, perempuan dan laki-laki	Persentase	Mengacu pada indikator kinerja utama Renstra Kemdikbud dan tujuan MDGs	Dinas Pendidikan Prov Kaltim	Angka melek huruf didapat dengan membagi jumlah penduduk usia 15 tahun keatas yang dapat membaca dan menulis dengan jumlah penduduk usia 15 tahun keatas kemudian hasilnya dikalikan dengan seratus.	Dinas Pendidikan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Alasan	Sumber Data	Cara Perhitungan	Penanggung Jawab
2.	Meningkatnya mutu, daya saing dan relevansi pendidikan di Kalimantan Timur	Angka Partisipasi Sekolah : - APK PAUD - APM SD/MI/SDLB - APK SD/MI/SDLB - APM SMP/MTs/SMP/PLB - APK SMP/MTs - APM SMA/MA/SMK - APK SMA/MA/SMK - APK PT	Persentase	Mengaacu pada indikator kinerja utama Renstra Kemdikbud	Dinas Pendidikan Prov.Kaltim dan BPS Prov.Kaltim	$\text{APK Tingkat SD} = \frac{\text{Jumlah Siswa SD/MI}}{\text{Penduduk 7-12 Tahun}} \times 100\%$ $\text{APK Tingkat SMP} = \frac{\text{Jumlah Siswa SMP/MTs}}{\text{Penduduk 13-15 Tahun}} \times 100\%$ $\text{APK Tingkat SM} = \frac{\text{Jumlah Siswa SMA/SMK/MA}}{\text{Penduduk 16-18 Thun}} \times 100\%$ $\text{APM Tingkat SD} = \left(\frac{\text{Jmh Siswa SD/MI}}{\text{Usia 7-12}} \right) : \left(\frac{\text{Penduduk 7-12 Tahun}}{X} \right) \times 100\%$ $\text{APM Tingkat SMP} = \left(\frac{\text{Jmh Siswa SMP/MTs}}{\text{Usia 13-15}} \right) : \left(\frac{\text{Penduduk 13-15 Tahun}}{X} \right) \times 100\%$ $\text{APM Tingkat SM} = \left(\frac{\text{Jmh Siswa SMA/SMK/MA}}{\text{Usia 16-18}} \right) : \left(\frac{\text{Penduduk 16-18 Thun}}{X} \right) \times 100\%$	Lamanya bersekolah dapat dikonversikan langsung dari jenjang pendidikan dan kelas tertinggi yang pernah diduduki seseorang, misalnya jika seseorang pendidikan tertingginya adalah SMP kelas 2, maka ia memiliki jumlah tahun bersekolah sama dengan 8 tahun, yaitu 6 tahun bersekolah di tingkat SD ditambah dengan 2 tahun di SM
	- Angka rata-rata lama sekolah	Tahun	Mengaacu pada indikator kinerja utama Renstra Kemdikbud dan tujuan MDGs			Angka Absolut	
	- Jumlah Sekolah Unggulan	Sekolah	Sesuai Permendiknas no.78 /2009 tentang sistem penjaminan mutu pendidikan, Perda no.3 tahun 2010 tentang penyelenggaraan pendidikan di Kaltim, Pergub no.22 Tahun 2013 tanggal 28 Maret 2013 tentang UPTD PKLK			$\text{Jumlah siswa SMA dibagi jumlah siswa SMA dan siswa SMK dikalikan 100\%}$	
	- Prosentase SMA terhadap SMK	Persentase	Mengaacu pada indikator kinerja utama Renstra Kemdikbud				

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Alasan	Sumber Data	Cara Perhitungan	Penanggung Jawab
		<ul style="list-style-type: none"> - Prosentase siswa Sekolah Luar Biasa Yang tertampung (SLB) <ul style="list-style-type: none"> * SDLB * SMP/LB * SMALB - Prosentase Penerima Beasiswa 	Persentase	Mengacu pada indikator kinerja utama Renstra Kemdikbud	Dinas Pendidikan Prov.Kaltim	Jumlah siswa SLB dibagi jumlah masyarakat SLB usia sekolah dikalikan 100%	
3.	Meningkatnya kualitas pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan di Kalimantan Timur.	Persentase Angka Kelulusan : <ul style="list-style-type: none"> - SD - SMP - SMA - SMK 	Persentase	Mengacu pada indikator kinerja utama Renstra Kemdikbud	Dinas Pendidikan Prov.Kaltim	Jumlah peserta lulus ujian dibagi jumlah peserta ujian dikalikan 100%	
		<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan Kualifikasi Guru (D4/S1/S2) - Perolehan medali kejuaraan di Tingkat Nasional 	Orang	Mengacu pada indikator kinerja utama Renstra Kemdikbud	Dinas Pendidikan Prov.Kaltim	Jumlah guru berkualifikasi D4/S1/S2 dibagi jumlah guru seluruhnya	
			Orang	Mengacu pada indikator kinerja utama Renstra Kemdikbud	Dinas Pendidikan Prov.Kaltim	Jumlah perolehan medali di kejuaraan tingkat nasional/internasional	

1. Nama Unit Organisasi : Dinas Pemuda dan Olahraga.

2. Tugas : Melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kepemudaan dan olahraga berdasarkan asas ekonomi dan tugas pembantuan

3. Fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang pemuda dan olahraga sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah;
2. Perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang pemuda dan olahraga;
3. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis kepemudaan;
4. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis kewirausahaan pemuda dan industri olahraga;
5. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis keolahragaan;
6. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
7. Pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
8. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;
9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Indikator Kinerja Utama :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Alasan	Sumber Data	Cara Perhitungan	Penanggung Jawab
1.	Terwujudnya partisipasi dan peran aktif pemuda dan pramuka di berbagai bidang pembangunan	1. Prosentase pemuda dan pramuka yang memperoleh kualitas SDM	Persen	Pemuda (usia 16-30 th) dan Pramuka sebagai generasi penerus diharapkan memiliki daya saing, jiwa dan mental kewirausahaan (entrepreneurship).	Renstra, BPS, Bappeda, Kemenpora, KNPI	Jumlah pemuda yang mengikuti peningkatan SDM Jumlah penduduk usia 16-30 Tahun	Dinas Pemuda dan Olahraga
2.	Terwujudnya kualitas olahraga Pembinaan, pemasyarakatan dan olahraga prestasi	1. Prosentase Atlet Berprestasi	Persen	Efektifitas Partisipasi masyarakat dalam keolahragaan yang luas akan menghasilkan bibit-bibit atlet berbakat menuju prestasi olahraga tingkat regional, nasional dan Internasional.	Renstra, BPS, Bappeda, Kemenpora, KONI	Jumlah Medali yang diperoleh Jumlah atlet	Dinas Pemuda dan Olahraga
		2. Prosentase Pembinaan Berprestasi	Persen		Renstra, BPS, Bappeda, Kemenpora	Jumlah Atlet yang terbit Jumlah Atlet Usia Sekolah	
		3. Prosentase Masyarakat mengikuti event Olahraga	Persen		Renstra, BPS, Bappeda, Kemenpora	Jumlah masyarakat yang mengikuti event olahraga Jumlah Penduduk	

1. Nama Unit Organisasi : Dinas Kesehatan
2. Tugas : Melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Kesehatan berdasarkan atas otonomi dan tugas pembantuan.
3. Fungsi :
 1. Perumusan kebijakan teknis bidang kesehatan sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah;
 2. Perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang kesehatan;
 3. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis sumber daya kesehatan;
 4. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis pelayanan kesehatan;
 5. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis kesehatan masyarakat;
 6. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis pemberantasan penyakit dan penyehatan lingkungan;
 7. Penyelenggaraan urusan sekretariat;
 8. Pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 9. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;
 10. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Indikator Kinerja Utama :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Alasan	Sumber Data	Cara Perhitungan	Penanggung Jawab
1.	Meningkatnya status kesehatan dan gizi masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prevalensi Balita Kekurangan Gizi (BB/umur, gizi kurang dan gizi buruk) 2. Angka Kematian Ibu melahirkan 	Persentase orang	<p>Balita merupakan masyarakat kelompok paling rawan akan masalah kesehatan. Dengan gambaran keberhasilan kesehatan kelompok ini maka tumbuh kembang anak menjadi manusia yang sehat</p> <p>Ibu Hamil merupakan masyarakat kelompok rawan akan masalah kesehatan. Dengan gambaran keberhasilan kesehatan kelompok ini maka akan melahirkan generasi yang sehat.</p>	Survei SDKI, Riskeddas Sigi	(Jumlah balita yang kekurangan gizi / jumlah seluruh balita) x 100%	Dinas Kesehatan
					Laporan Program, SKIA	Jumlah kematian ibu per 100.000 KH	

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Alasan	Sumber Data	Cara Perhitungan	Penanggung Jawab
2.	Menurunnya angka kesakitan	1. Persentase Angka Kesakitan	Persentase	Menggambarakan mutu layanan dalam pengendalian penyakit dan merupakan gambaran komposit penyakit menular dan tidak menular	BPS, Laporan Program	(Jumlah kejadian penyakit tertentu / Jumlah Populasi Rentan) x 100%	
3.	Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk hidup bersih dan sehat serta berperan aktif dalam upaya kesehatan masyarakat	1. Persentase Rumah Tangga PHBS	Persentase	Menggambarakan indikator komposit untuk menilai kesadaran masyarakat untuk ber PHBS	BPS, Laporan Program	(Jumlah Rumah Tangga yang memenuhi tatanan PHBS / Jumlah seluruh Rumah Tangga) x 100%	
4.	Terpenuhnya sumber daya kesehatan yang merata, bermutu dan berstandar kompetensi	1. Rasio Dokter per 1000 penduduk 2. Rasio Bidan per desa	per 100.000 penduduk per desa	Ukuran ketersediaan tenaga kesehatan yang tidak tergantikan yang terkait langsung dengan capaian keberhasilan penurunan kematian ibu, bayi dan balita	Laporan Program	(Jumlah bidan yang menetap di desa dibandingkan jumlah desa)	
		3. Rasio Perawat per 1000 penduduk	per 100.000 penduduk	Ukuran ketersediaan tenaga kesehatan yang terkait langsung dengan capaian keberhasilan penurunan kematian ibu, bayi dan balita	Laporan Program	(Jumlah Perawat yang bekerja / Jumlah penduduk diwilayah tersebut) x 1000	

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Alasan	Sumber Data	Cara Perhitungan	Penanggung Jawab
		4. Persentase Jaminan Pemeliharaan Kesehatan	persentase	merupakan gambaran kekuatan masyarakat dalam menghadapi masalah pembiayaan pelayanan kesehatan	Laporan Program	(Jumlah penduduk yang memiliki jaminan kesehatan / Jumlah seluruh penduduk) x 100%	
		5. Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin	persentase	Ukuran ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan obat genetik dan vaksin yang bermutu	Laporan Program	(Jumlah obat & vaksin yang tersedia/kebutuhan dalam 18 bulan) x 100%	

1. Nama Unit Organisasi : **Dinas Sosial**
2. Tugas : melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Sosial berdasarkan atas otonomi dan tugas pembantuan.
3. Fungsi :
 1. Perumusan kebijakan teknis bidang Sosial sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah;
 2. Perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang Sosial;
 3. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis pemberdayaan sosial;
 4. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis pelayanan dan rehabilitasi sosial;
 5. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bantuan dan jaminan sosial;
 6. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
 7. Pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 8. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;
 9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Indikator Kinerja Utama :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Alasan	Sumber Data	Cara Perhitungan	Penanggung Jawab
1	Meningkatkan kualitas hidup Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	1 Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang diberdayakan, Rehabilitasi dan mendapatkan perlindungan, jaminan sosial dalam memenuhi kebutuhan dasarnya.	Orang	Mengukur Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) agar dapat meningkatkan kualitas hidupnya melalui upaya-upaya rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial.	Laporan Instansi SKPD sosial Kab/Kota, SKPD Bidang Sosial, Laporan UPTD dan laporan kinerja bidang teknis serta Badan pusat Statistik (BPS), serta sumber lain yang valid	Jumlah populasi PMKS – Jumlah PMKS yang tertangani	Dinas Sosial
2	Meningkatkan potensi sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	1 Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) penerima manfaat yang mampu berperan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial serta dapat menjalankan fungsi sosialnya secara mandiri.	Orang	Mengukur Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) agar dapat meningkatkan potensi dirinya melalui upaya-upaya rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial, pelatihan keterampilan berusaha dan pemberian bantuan stimulan.	Laporan Instansi sosial Kab/Kota, SKPD Bidang Sosial, Laporan UPTD dan laporan kinerja bidang teknis serta Badan pusat Statistik (BPS), serta sumber lain yang valid	Jumlah populasi PMKS – Jumlah PMKS yang tertangani	Dinas Sosial

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Alasan	Sumber Data	Cara Perhitungan	Penanggung Jawab
3	Meningkatkan kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	<p>1 Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif dalam penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).</p> <p>2 Jumlah organisasi sosial masyarakat (ORSOS) yang aktif dalam penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).</p> <p>3 Jumlah dunia usaha yang berperan dalam penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).</p>	PSKS	Mengukur potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS), organisasi sosial masyarakat (ORSOS) dan dunia usaha dalam meningkatkan kepeduliannya terhadap penanganan masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	Laporan Instansi sosial Kab/Kota, SKPD Bidang Sosial, Laporan UPTD dan laporan kinerja bidang teknis serta Badan pusat Statistik (BPS)	Jumlah PSKS, ORSOS dan Dunia Usaha Jumlah PSKS, ORSOS dan Dunia Usaha yang tidak berperan aktif	
4	Meningkatkan akuntabilitas kinerja SKPD	<p>1 Jumlah aparat yang mengikuti diklat pengembangan SDM</p> <p>2 Menurunnya pelanggaran disiplin</p> <p>3 Jumlah dokumen perencanaan, keuangan, laporan capaian kinerja yang tersusun dan system informasi yang terbangun</p>	Orang	Mengukur tingkat akuntabilitas dan kinerja SKPD	Laporan bulanan UPTD dan laporan kinerja bidang teknis serta sekretariat	Jumlah aparat yang mengikuti diklat Jumlah seluruh aparat – Jumlah aparat yang tidak melanggar disiplin Jumlah dokumen yang telah dibuat	

1. Nama Unit Organisasi : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Kaltim
2. Tugas : Melaksanakan urusan pemerintah daerah dibidang tenaga kerja dan transmigrasi berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
3. Fungsi :
 1. Perumusan kebijakan teknis dibidang tenaga kerja dan transmigrasi sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah.
 2. Perencanaan, Pembinaan dan Pengendalian kebijakan teknis dibidang tenaga kerja dan transmigrasi.
 3. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis pengembangan tenaga kerja.
 4. Perumusan, Perencanaan, Pembinaan, dan Pengendalian kebijakan teknis pengawasan ketenagakerjaan.
 5. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis hubungan Industrial dan jaminan sosial tenaga kerja.
 6. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis transmigrasi.
 7. Penyelenggaraan urusan sekretariat.
 8. Pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Dinas.

4. Indikator Kinerja Utama :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Alasan	Sumber Data	Cara Perhitungan	Penanggung Jawab
1.	Menurunkan jumlah pengangguran	1. Tingkat Pengangguran Terbuka	Persentase	Mengukur efektivitas kinerja lahan dan perluasan kesempatan kerja	- Kaltim Dalam Angka - Buku Saku Disnakertrans Prov. Kaltim - Laporan Permendagri 18 / 2011 - Laporan Kepranakertrans 1 / 2014	$\frac{\text{Penganggur Terbuka}}{\text{Angkatan Kerja}} \times 100\%$	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Kaltim
2.	Meningkatnya kualitas Hubungan Industrial	1. Penyelesaian Perselisihan HI di Luar Pengadilan Hubungan Industrial	Persentase	Mengukur Penyelesaian / Perselisihan Hubungan Industrial diluar pengadilan	- Buku Saku Disnakertrans Prov. Kaltim - Laporan Permendagri 18 / 2011	$\frac{\text{Kasus yang diselesaikan}}{\text{Kasus yang dicatatkan}} \times 100\%$	
3.	Meningkatnya Penerapan Ketenagakerjaan dan K3	1. Penyelesaian Kasus dengan Penetapan	Persentase	Untuk menggambarkan kinerja pembinaan dan pengawasan terhadap penerapan norma Ketenagakerjaan dan K3	- Buku Saku Disnakertrans Prov. Kaltim - Laporan Permendagri 18 / 2011	$\frac{\text{Jumlah penyelesaian kasus dengan rekomendasi}}{\text{Kasus yang dicatatkan}} \times 100\%$	

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Alasan	Sumber Data	Cara Perhitungan	Penanggung Jawab
4.	Pembangunan Transmigrasi Pemukiman	1. Permukiman Transmigrasi Mandiri	Kintrens	Untuk menggambarakan kinerja penempatan, pembinaan dan pemberdayaan transmigrasi	<ul style="list-style-type: none"> - Katim Dalam Angka - Buku Saku Disnakertans Prov. Katim - Laporan Permendagri 18 / 2011 - Laporan Kepmerakertrans 1 / 2014 	Jumlah permukiman transmigrasi mandiri	

1. Nama Unit Organisasi : Dinas Perhubungan

2. Tugas : melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perhubungan berdasarkan atas otonomi dan tugas pembantuan.

3. Fungsi : 1. Perumusan kebijakan teknis bidang perhubungan sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah;
2. Perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang perhubungan;
3. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis perhubungan darat;
4. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis perhubungan laut;
5. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis perhubungan udara;
6. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis lalu lintas angkutan sungai, danau dan penyeberangan;
7. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
8. Pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
9. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;
10. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Indikator Kinerja Utama :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Alasan	Sumber Data	Cara Perhitungan	Penanggung Jawab
1.	Meningkatnya pelayanan transportasi darat	1. Prosentase Kinerja Pelayanan AKDP	(%)	Mengukur kinerja pelayanan AKDP	Perhubungan Dalam Angka, LPPD	$= \frac{\text{Jumlah tempat Duduk Penumpang}}{\text{Jumlah Penumpang}}$	Kepala Bidang Perhubungan Darat
2.	Menurunnya angka kecelakaan di jalan	1. Kejadian kecelakaan di jalan (Kejadian)	Kejadian	Mengendalikan kecelakaan di jalan tingkat	Perhubungan Dalam Angka	Angka Jadi	Kepala Bidang Perhubungan Darat
3.	Meningkatnya pemenuhan infrastruktur perhubungan	1. Peningkatan kuantitas komoditas dan penumpang	Ton/Thn dan Org/Thn	Mengukur kapasitas infrastruktur perhubungan	Perhubungan Dalam Angka, LAKIP	Angka Jadi	Kepala Bidang Perhubungan Darat, Laut, Udara dan SDP

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Alasan	Sumber Data	Cara Perhitungan	Penanggung Jawab
4.	Bertambahnya wilayah yang terlayani moda transportasi Darat, Udara dan SDP	<ol style="list-style-type: none"> Jumlah Kecamatan yang belum terlayani transportasi Darat dan SDP Jumlah Kecamatan yang belum terlayani transportasi Udara 	Jumlah	<p>Mengukur infrastruktur Perhubungan Darat dan SDP di wilayah Kecamatan</p> <p>Mengukur infrastruktur Perhubungan Udara di wilayah Kecamatan</p>	Perhubungan Dalam Angka, LAKIP Perhubungan Dalam Angka, LAKIP	Angka Jadi	<p>Kepala Bidang Perhubungan Darat dan SDP</p> <p>Kepala Bidang Perhubungan Udara</p>
5	Meningkatnya Angka Kelulusan SMK Pelayaran Kalim Yang Bersertifikat Pelaut	<ol style="list-style-type: none"> Angka Kelulusan Taruna yang Bersertifikasi Pelaut 	Org/Thn	Mengukur tingkat kelulusan Taruna Pelaut	Perhubungan Dalam Angka	Angka Jadi	Direktur SMK Pelayaran Kalimantan Timur
6	Meningkatnya pengembangan teknologi transportasi yang ramah lingkungan	<ol style="list-style-type: none"> Kontribusi sektor Perhubungan dalam penanganan isu lingkungan (%) 	(%)	Mengukur infrastruktur Perhubungan yang bersertifikasi lingkungan	Perhubungan Dalam Angka	$\frac{\text{Jumlah Prasarana Perhubungan}}{\text{Jumlah Prasarana Perhubungan yang bersertifikat lingkungan}}$	Kepala Bidang Perhubungan Darat, Laut, Udara dan SDP

1. Nama Unit Organisasi : Dinas Komunikasi dan Informatika

2. Tugas : Melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang komunikasi dan informatika berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

3. Fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang komunikasi dan informatika sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah;
2. Perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang komunikasi dan informatika;
3. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis teknologi informasi;
4. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis aplikasi telematika;
5. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis dokumentasi dan informasi;
6. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis pos dan telekomunikasi;
7. Penyelenggaraan urusan kesekretaratan;
8. Pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
9. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;
10. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Indikator Kinerja Utama :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Alasan	Sumber Data	Cara Perhitungan	Penanggung Jawab
1.	Meningkatkan sarana dan prasarana teknologi komunikasi dan Informatika yang menunjang kegiatan Pemerintahan Daerah	1. Jumlah Aplikasi Terintegrasi	Aplikasi	Meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan sistem pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi	Renstra Diskominfo 2013 - 2018	Jumlah SKPD dan Aplikasi yang diintegrasikan	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.	Terwujudnya keterbukaan informasi dengan meningkatkan sistem, metode, dan mutu penyebarluasan serta pelayanan informasi kepada masyarakat	1. Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat dalam memperoleh informasi	Persentase	Menciptakan transparansi terhadap sistem pemerintahan, kepada masyarakat serta mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap pembangunan Kalimantan	Renstra Diskominfo 2013 - 2018	Rasio total nilai perunsur dan unsur yang terisi	
3.	Tersedianya Infrastruktur bidang komunikasi dan Informatika dalam pemenuhan kebutuhan akses informasi kepada masyarakat	1. Persentase Coverage area	Persentase	Mengurangi kesenjangan informasi disegenap lapisan masyarakat Kalimantan Timur	Renstra Diskominfo 2013 - 2018	Rasio daerah coverage dan jumlah desa dikalim	

1. Nama Unit Organisasi : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

2. Tugas : melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kebudayaan dan pariwisata berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

3. Fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang pariwisata dan kebudayaan sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah;
2. Perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang kebudayaan dan pariwisata;
3. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang kebudayaan dan pariwisata;
4. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bina pengembangan destinasi pariwisata;
5. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis usaha jasa dan sarana pariwisata;
6. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bina pemasaran dan kerjasama;
7. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
8. Pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
9. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;
10. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Indikator Kinerja Utama :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Alasan	Sumber Data	Cara Perhitungan	Penanggung Jawab
1.	Meningkatnya jumlah obyek wisata	1. Jumlah Persentase Kunjungan : - Wisatawan Nusantara - Wisatawan Mancanegara	Persentase	Merupakan Program prioritas di RPJMD 2013-2018 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	RPJMD Prov. Kaltim 2013-2018 dan Renstra Disbudpar masing Kabupaten/ Kota se Kaltim 2013-2014	Jumlah kunjungan wisatawan di masing- masing Kabupaten/ Kota se Kaltim	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

1. Nama Unit Organisasi : Dinas Pekerjaan Umum.

2. Tugas : melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pekerjaan umum berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

3. Fungsi :
 1. Perumusan kebijakan teknis bidang pekerjaan umum sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah;
 2. Perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum;
 3. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang penataan ruang;
 4. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang sumber daya air;
 5. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang kehutanan;
 6. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang keciprakan;
 7. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
 8. Pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 9. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;
 10. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Indikator Kinerja Utama :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Alasan	Sumber Data	Cara Perhitungan	Penanggung Jawab
1.	Tersedianya peraturan penataan ruang sebagai pelaksanaan pembangunan	1. Penyiapan peraturan penataan ruang	skor	Perda/pergub bidang penataan ruang diperlukan sebagai landasan hukum bagi pemerintah dan masyarakat dalam pelaksanaan penataan ruang	Perencanaan Penataan Ruang	Skor kinerja dihitung berdasarkan 4 kriteria yang masing-masing memiliki bobot proporsional hingga mencapai 35% (bobot IKU terhadap keseluruhan kinerja penataan ruang). Skor masing-masing kriteria (0 - 100) dihitung berdasarkan tahapan yang telah diselesaikan. Skor = $0,1K1 + 0,1K2 + 0,075K3 + 0,075K4$	Dinas Pekerjaan Umum.
2.	Meningkatnya kapasitas dan kinerja pemerintah dan masyarakat pelaksana penataan ruang	1. Pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas pelaksana penataan ruang	skor	Kegiatan pembinaan diperlukan untuk meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat	Perencanaan Penataan Ruang	Skor kinerja dihitung berdasarkan 8 kriteria yang masing-masing memiliki bobot proporsional hingga mencapai 20% (bobot IKU terhadap keseluruhan kinerja penataan ruang). Skor masing-masing kriteria (0 - 100) dihitung berdasarkan kegiatan yang telah dilaksanakan. Skor = $0,04K1 + 0,015K2 + 0,025K3 + 0,025K4 + 0,015K5 + 0,03K6 + 0,01K7 + 0,04K8$	Dinas Pekerjaan Umum.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Alasan	Sumber Data	Cara Perhitungan	Penanggung Jawab	
3.	Terlaksananya proses perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang sesuai peraturan perundangan yang berlaku	1. Proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang	skor	Perencanaan, pemanfaatan ruang sesuai rencana, dan upaya pengendalian diperlukan untuk mencapai tujuan penataan ruang yang telah disepakati	Perencanaan Penataan Ruang	Bidang	Skor kinerja dihitung berdasarkan 3 kriteria yang masing-masing memiliki bobot proporsional hingga mencapai 45% (bobot IKU terhadap keseluruhan kinerja penataan ruang). Skor masing-masing kriteria (0 - 100) dihitung berdasarkan kegiatan yang telah dilaksanakan. Skor = $0,2K1 + 0,1K2 + 0,15K3$	
4.	Terlaksananya pengawasan penataan ruang	1. Penyiapan perangkat pengawasan penataan ruang	Persentase	Instrumen pengawasan diperlukan agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Perencanaan Penataan Ruang	Bidang	$\frac{\text{Progres penyajian perangkat pengawasan}}{\text{Perangkat yang harus tersedia sampai 2018}} \times 100\%$	
5.	Meningkatnya kapasitas dan kinerja pembina jasa konstruksi di Provinsi serta Kab/Kota	1. Meningkatkan pelayanan jasa konstruksi	Persentase					
6.	Meningkatnya infrastruktur SDA (waduk, embung, danau dan lain lain) bagi pengembangan kawasan pertanian.	1. Peningkatan luas daerah irigasi yang terlayani 2. Persentasi peningkatan jumlah bendungan untuk pengembangan irigasi dan air baku	Ha	Tahun 2014 - 2018 ditargetkan dapat dibangun 5 (lima) daerah irigasi (D.I.)	Perencanaan Bidang Sumber Daya Air	Bidang Bendungan Marangkayu 1500 Ha Bendungan Kaliorang 1200 Ha Bendung Sungai Buluh 1098 Ha Bendung Selangka 1000 Ha Bendung Telake 2950 Ha		
5.	Terwujudnya ketersediaan air baku Jumlah penduduk yang terlayani (604.800 penduduk)	1. Meningkatkan jumlah debit air baku	Ltr/detik	Penyediaan air baku untuk kawasan Industri Kariangau, KIP1 Maloy, dan pendukung MP3EI.	Perencanaan Bidang Sumber Daya Air	Air Baku Sekerat 300 Ltr/det Bendungan Kaliorang 300 Ltr/det Bendungan Marangkayu 450 Ltr/det Bendung Wain 170 Ltr/det		
6.	Terwujudnya infrastruktur pengendali banjir serta mencegah intrusi air laut.	1. Persentasi berkurangnya luas area daerah rawan banjir	Persentase	Mengurangi luas genangan banjir dengan bangunan pengendali banjir	Perencanaan Bidang Sumber Daya Air	Luas Genangan Awal 492 Ha Luas Genangan Akhir 43 Ha Target Berkurangnya Genangan 450 Ha		

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Alasan	Sumber Data	Cara Perhitungan	Penanggung Jawab
7.	Terwujudnya infrastruktur daerah tangkapan air	1. Berkurangnya lahan kritis untuk daerah tangkapan air	Persentase	Meningkatkan konservasi DAS dan daerah tangkapan air (danau, sungai)	Perencanaan Bidang Sumber Daya Air	Luas Area Konservasi DAS 20 Ha DAS Kuaru Kab. Paser Danau Kanaan Kota Bontang DAS Sempaja Kota Samarinda DAS Bontang Kota Bontang Konservasi Mata Air (Biatan dan Sekerat)	
8.	Peningkatan kualitas jalan eksisting.	1. Meningkatkan kualitas jalan provinsi	Km	Untuk menunjang pengembangan kawasan-kawasan strategi & Kawasan Tumbuh Kembang	Perencanaan Bidang Bina Marga	Berdasarkan index layanan terhadap masyarakat	
9.	Bertambahnya panjang jalan.	1. Meningkatnya panjang jalan baru yang dibangun	Km	Membuka ketersoliasian	Perencanaan Bidang Bina Marga	Berdasarkan bertambahnya jumlah kendaraan bermotor	
10.	Kemantapan jalan provinsi	1. Terpeliharanya kondisi ruas jalan	Persentase	Untuk meningkatkan kapasitas jalan dan memberikan kepuasan pengguna jalan	Perencanaan Bidang Bina Marga	Berdasarkan bertambahnya dan kapasitas kendaraan	
11.	Terwujudnya jembatan yang menghubungkan antar kawasan	1. Terhubungnya jalan antar wilayah yang terputus	Jembatan	Untuk menghubungkan antar wilayah yang terputus dan memberikan kepuasan pengguna jembatan	Perencanaan Bidang Bina Marga	Berdasarkan studi kelayakan dan kebutuhan jembatan	
12.	Terwujudnya infrastruktur persampahan 3R	1. Meningkatnya luas kawasan bersih	Kawasan	PROGRAM PRIORITAS	Perencanaan Bidang Cipta Karya	Angka Absolute	
13.	Terwujudnya sistem drainase	1. Meningkatnya panjang jaringan drainase	M	PROGRAM PRIORITAS	Perencanaan Bidang Cipta Karya	Angka Absolute	
14.	Terwujudnya infrastruktur sanitasi komunal	1. Meningkatnya luas cakupan sanitasi komunal	SR	PROGRAM PRIORITAS	Perencanaan Bidang Cipta Karya	Angka Absolute	
15.	Terwujudnya lingkungan permukiman yang layak huni	1. Berkurangnya rumah tidak layak huni bagi masyarakat tidak mampu	Unit	PROGRAM PRIORITAS	Perencanaan Bidang Cipta Karya	Angka Absolute	

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Alasan	Sumber Data	Cara Perhitungan	Penanggung Jawab
16.	Meningkatnya ketersediaan air minum bagi masyarakat perkotaan dan perdesaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan jumlah debit air minum yang dihasilkan bagi masyarakat 2. Berkurangnya jumlah desa yang belum memiliki air bersih 	Liter/detik Desa	PROGRAM PRIORITAS PROGRAM PRIORITAS	Perencanaan Bidang Karya Perencanaan Bidang Karya	Angka Absolute Angka Absolute	



1. Nama Unit Organisasi : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
2. Tugas : Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah Di Bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkrm) Berdasarkan Asses Otonomi Dan Tugas Pembantuan.
3. Fungsi : 1. Perumusan kebijakan teknis bidang , Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah;
 2. Perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang , Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
 3. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis industri;
 4. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis perdagangan dalam negeri;
 5. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis perdagangan luar negeri;
 6. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah;
 7. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
 8. Pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 9. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;
 10. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasannya sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Indikator Kinerja Utama :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Asasan	Sumber Data	Cara Pertitungan	Penanggung Jawab
1.	Meningkatnya pertumbuhan sektor Industri	1. Persentase pertumbuhan industri	Persen	untuk mengetahui pertumbuhan dan perkembangan industri di Kalimantan sebagai salah satu tolak ukur keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang dapat digunakan dalam perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja	Kabupaten Kota	Se Ket : PPI = persentase pertumbuhan industri [PI] = jumlah industri Se Kalimantan pada tahun yang akan dihitung [PI] = jumlah industri Se Kalimantan pada tahun lalu	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
2	Meningkatnya jumlah produk OVOP dan KIID	2 Jumlah produk OVOP dan KIID	produk	untuk mengetahui perkembangan produk yang dihasilkan melalui pencapaian serta industri sesuai konsep OVOP dan KIID	UPTD P3UKM	mendata jumlah produk yang dihasilkan di sentra industri	
3	Meningkatnya kontribusi sektor industri terhadap PDRB	3 Persentase kontribusi sektor industri terhadap PDRB	Persen	untuk mengetahui peran sektor industri dalam perekonomian di Provinsi Kalimantan	BPS	membagi nilai sektor industri dengan nilai PDRB dikalikan 100%	

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Asasan	Sumber Data	Cara Perhitungan	Penanggung Jawab
4	Meningkatnya jumlah klaster industri pengolahan	4 Jumlah klaster industri pengolahan	Klaster	untuk mengetahui kajian tentang bisnis dan pengembangan industri pengolahan	Dinas Perindagkop dan UMKM Provinsi Kaltim - Bidang Industri	mendata industri pengolahan	
5	Meningkatnya kemampuan desain produk unggulan daerah	5 Jumlah desain produk unggulan daerah	desain produk	untuk mengetahui perkembangan inovasi produk UKM sebagai prototype produk bagi UKM di wilayah Kalimantan Timur	UPTD P3UKM	mendata jumlah desain produk yang dipromosikan di ruang pameran UPTD P3UKM	
6	Meningkatnya pengembangan teknologi tepat guna sesuai potensi daerah	6 Jumlah rekayasa TTG sesuai potensi daerah	teknologi	untuk mengetahui perkembangan rekayasa TTG sesuai potensi daerah	Dinas Perindagkop dan UMKM Provinsi Kaltim - Bidang Industri	mendata kegiatan TTG pengolahan	
7	Terwujudnya sistem distribusi yang efisien	7 Disparitas harga antarmasyarakat	Persen	untuk mengukur perbandingan harga antara Provinsi dengan Kabupaten/Kota	Dinas Perindagkop dan UMKM Kabupaten/Kota dan Provinsi	$\frac{(T_{sk} - T_{sb})}{T_{sb}} \times 100\%$	
8	Terkendalinya pasar impor secara efisien	8 Jumlah penurunan impor barang konsumsi	US\$ juta	untuk mengetahui perkembangan impor non migas Kaltim	BPS dan Indonesia	$\frac{(T_{sk} - T_{sb})}{T_{sb}} \times 100\%$	
9	Meningkatnya nilai ekspor non migas	9 Nilai ekspor non migas	US\$ milyar	untuk mengetahui perkembangan ekspor non migas Kaltim	BPS dan Bank Indonesia	$\frac{(T_{sk} - T_{sb})}{T_{sb}} \times 100\%$	
10	Meningkatnya pengawasan dan pengendalian mutu barang (komoditi produk)	10 Jumlah kemampuan pengujian pada komoditi produk	unit usaha	untuk mengetahui pengembangan ruang lingkup pengujian dan kalibrasi	Sasaran Mutu Laboratorium Pengujian dan Kalibrasi UPTD BPSMB Tahun 2014	Berdasarkan permintaan customer yang tidak dapat dilayani dikembangkan secara bertahap	
11	Menurunnya peredaran barang dan jasa yang tidak sesuai standar	11 Jumlah barang dan jasa yang tidak sesuai standar per tahun	item	untuk mengawasi peredaran barang yang tidak sesuai standar	Dinas Perindagkop dan UMKM Kabupaten/Kota dan Provinsi	Berdasarkan hasil pengawasan	

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Alasan	Sumber Data	Cara Perhitungan	Penanggung Jawab
12	Meningkatnya Kinerja Kelembagaan dan Usaha Koperasi dan UMKM	12 Jumlah koperasi berkualitas	unit	untuk mengetahui perkembangan koperasi dengan kinerja baik	SKPD terkait, Dinas Perindagkop dan UMKM Provinsi dan Kabupaten/Kota	Berdasarkan laporan data pemerintahan, penilaian kesehatan dan RAT Koperasi	
		13 Persentase Sumbangan PDRB sektor Koperasi dan UMKM	persen	untuk mengetahui kontribusi sektor Koperasi dan UMKM terhadap PDRB Kalitin	BPS, Dinas Perindagkop dan UMKM Provinsi Kabupaten/Kota	Berdasarkan laporan dinas dan perhitungan BPS	
13	Meningkatnya jumlah wirasusaha baru	14 Persentase penyerapan tenaga kerja dan investasi sektor Koperasi dan UMKM	persen	untuk mengetahui jumlah penyerapan tenaga kerja dan investasi di sektor Koperasi dan UMKM	BPS, Dinas Perindagkop dan UMKM Prov dan Kabupaten/Kota	Berdasarkan laporan dinas dan perhitungan BPS	
		15 Penumbuhan jumlah WUB	WUB	untuk mengetahui realisasi jumlah WUB yang tumbuh	Dinas Perindagkop dan UMKM Provinsi dan SKPD terkait	Berdasarkan jumlah WUB yang dilatih, didampingi dan diberikan bantuan peralatan pengembangan usaha	
14	Meningkatnya sarana prasarana Koperasi dan UMKM	16 Penumbuhan jumlah inkubasi UKM/WUB	WUB	untuk mengetahui jumlah UMKM/WUB yang diinkubasi untuk pengembangan usahanya	Dinas Perindagkop dan UMKM Provinsi dan SKPD terkait	Berdasarkan jumlah WUB yang dilakukan program inkubasi	
		17 Jumlah sarana prasarana perberdayaan Koperasi dan UMKM	unit	untuk mengetahui pengembangan sarana prasarana perberdayaan KUKM yang tersedia	Dinas Perindagkop dan UMKM Provinsi dan SKPD terkait	Berdasarkan sarana prasarana yang diserahkan kepada Koperasi dan UMKM	
		18 Jumlah koperasi UMKM yang melakukan kontak dagang	unit usaha	untuk mengetahui jumlah kontak yang melibatkan koperasi dan UMKM yang dilakukan partner/ misi dagang	Dinas Perindagkop dan UMKM Provinsi dan SKPD terkait	Berdasarkan jumlah kontak dagang yang terjadi	
		19 Jumlah koperasi/ UMKM yang melakukan kemitraan	unit usaha	untuk mengetahui jumlah kemitraan usaha yang melibatkan koperasi dan UMKM dengan perusahaan/koperasi lain	Dinas Perindagkop dan UMKM Provinsi dan SKPD terkait	Berdasarkan jumlah kemitraan yang terjadi	
		20 Jumlah koperasi UMKM yang mendapat program pembiayaan	unit usaha	untuk mengetahui jumlah koperasi dan UMKM yang mendapat program pembiayaan dari lembaga pembiayaan, baik perbankan maupun non perbankan	Dinas Perindagkop dan UMKM Provinsi dan SKPD terkait	Berdasarkan jumlah koperasi dan UMKM yang difasilitasi/didampingi mengajukan pembiayaan sumber pembiayaan	

1. Nama Unit Organisasi : Dinas Pertanian Tanaman Pangan
2. Tugas : Melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pertanian tanaman pangan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan
3. Fungsi :
 1. Perumusan kebijakan teknis bidang pertanian tanaman pangan sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah;
 2. Perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang pertanian tanaman pangan
 3. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis produksi tanaman pangan
 4. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis produksi hortikultura
 5. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis produksi pengolahan lahan dan air
 6. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis sarana pertanian
 7. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan
 8. Pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Dinas
 9. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional
 10. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya

4. Indikator Kinerja Utama :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Alasan	Sumber Data	Cara Perhitungan	Penanggung Jawab
1.	Meningkatnya produksi padi dan ubi kayu	Nilai Tukar Petani (NTP) Jumlah produksi 1. Padi 2. Ubi Kayu Produktivitas Padi	Persentase Ton Ton Kuintal/Ha	Meningkatkan kontribusi sektor pertanian tanaman pangan yang menjadi unggulan daerah sebagai sumber energi baru dan terbarukan	Renstra Tahun 2013 - 2018 Rencana Kerja LAKIP Laporan Tahunan	Nilai Tukar Petani (NTP) = Perbandingan indeks harga yang diterima petani terhadap index harga yang dibayar petani Produksi = Luas panen x produktivitas 10 Produktivitas = Produksi Luas Panen	Dinas Pertanian Tanaman Pangan
2.	Meningkatnya sarana dan prasarana pertanian	1. Jumlah lahan yang di optimasi 2. Jumlah jalan usaha tani 3. Jumlah pintu air 4. Jumlah lahan yang di cetak 5. Jumlah alat dan mesin pertanian	Ha Km Unit Ha Unit			Angka Absolut	
3.	Pengembangan sentra padi	Jumlah kawasan padi	Kawasan			Angka Absolut	

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Alasan	Sumber Data	Cara Perhitungan	Penanggung Jawab
4.	Peningkatan kapasitas petani dalam penerapan adaptif dan praktik pertanian ramah lingkungan yang akan mengurangi emisi dari sektor pertanian	Demplot pertanian tanaman pangan pada lahan yang terdegradasi	Demplot			Angka Absolut	
5.	Meningkatnya produksi durian/ai, jeruk, pepaya, pisang	Jumlah produksi 1. Durian / Lai 2. Jeruk 3. Pisang 4. Pepaya	Ton Ton Ton Ton			Produksi buah = Berat per buah x jumlah buah dalam 1 pohon	
6.	Berkembangnya kawasan usaha agribisnis terpadu (KUAT)	1. Jumlah kawasan usaha agribisnis terpadu (Demplot)	Demplot			Angka Absolut Nilai Tukar Petani (NTP) = Perbandingan indeks harga yang diterima petani terhadap indek harga yang dibayar petani	
7.	Meningkatnya jumlah kebun yang teregistrasi	Jumlah kebun yang teregistrasi (Kebun)	Kebun			Angka Absolut	
8.	Meningkatnya jumlah stasiun terminal agribisnis (STA)	Jumlah Stasiun Terminal Agribisnis (STA)	Unit			Angka Absolut	

1. Nama Unit Organisasi : Dinas Peternakan

2. Tugas : Melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Peternakan dan kesehatan hewan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan

3. Fungsi :

1. Perumusan kebijaksanaan teknis bidang peternakan sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah;
2. Perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijaksanaan teknis bidang peternakan;
3. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang peternakan;
4. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis perbibitan dan budidaya peternakan;
5. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis pengembangan kawasan dan usaha peternakan;
6. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis kesehatan hewan;
7. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis pasca panen dan kesehatan masyarakat veteriner;
8. Penyelenggaraan urusan kesekretarian;
9. Pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
10. Pembinaan kelompok jabatan fungsional;
11. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

4. Indikator Kinerja Utama :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Alasan	Sumber Data	Cara Perhitungan	Penanggung Jawab
1.	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap produk pangan asal ternak (dagang dan telur)	1. Persentase Ketersediaan lokal daging dan telur	Persentase	<ul style="list-style-type: none"> - Populasi ternak di Kalimantan Timur masih rendah - Produksi daging dan telur masih rendah - Tingginya kasus kejadian penyakit lembana - Tingginya gangguan reproduksi ternak sapi/kerbau (cacangan) - Tingginya kasus AI - Pemanfaatan lahan eks tambang belum optimal 	Renstra, Statistik Peternakan	Formulasi Penghitungan : Ketersediaan Lokal Daging : $K = \frac{\text{Produksi Lokal (ton)}}{\text{Konsumsi (ton)}} \times 100\%$ Ketersediaan Lokal Telur : $K = \frac{\text{Produksi Lokal (ton)}}{\text{Konsumsi (ton)}} \times 100\%$	Dinas Peternakan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Alasan	Sumber Data	Cara Perhitungan	Penanggung Jawab
2.	Meningkatnya Penerapan teknologi peternakan tepat guna dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan sumber daya terbarukan	1. Jumlah masyarakat yang memanfaatkan biogas 2. Jumlah kebutuhan hasil IB 3. Jumlah peternak yang memanfaatkan teknologi pakan	KK Ekor	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah keluarga miskin yang belum memelihara ternak - Penggunaan energi alternatif meningkat - Perbaikan mutu genetik ternak sapi - Perbaikan pakan berkualitas 	Laporan tahunan dan LAKIP	<p>Rumus = 1 (satu) unit biogas memerlukan kotoran ternak dari 3-4 ekor sapi, sedangkan peternak (KK) memiliki ternak sapi rata-rata 3-4 ekor.</p> <p>Rumus = Kebutuhan hasil IB sebesar 80-85% dari jumlah yang di IB</p> <p>Rumus = 1 (satu) unit alat pengolahan pakan bisa dimanfaatkan oleh 10-15 KK</p>	
3.	Menurunkan tingkat keresahan masyarakat terhadap pemisuan daging.	1. Kasus pemisuan daging	Kasus	<p>Masih terbatasnya usaha pengolahan hasil peternakan karena keterbatasan bahan baku dan keterampilan pelaku usaha. Masih banyak kasus pemisuan daging yang terjadi di Kalimantan Timur</p>	Laporan tahunan dan LAKIP	Kasus pemisuan daging menurun sebesar 5% setiap tahun	

1. Nama Unit Organisasi : Dinas Kelautan dan Perikanan.

2. Tugas : Melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kelautan dan perikanan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

3. Fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang kelautan dan perikanan sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah;
2. Perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang kelautan dan perikanan;
3. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis perikanan budidaya;
4. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis perikanan tangkap;
5. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
6. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis kelautan, pesisir, pulau-pulau kecil dan pengawasan sumber daya ikan (sd);
7. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
8. Pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
9. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;
10. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Indikator Kinerja Utama :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Alasan	Sumber Data	Cara Perhitungan	Penanggung Jawab
1.	Meningkatkan Produksi Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya	1. Produksi Perikanan Tangkap 2. Produksi Perikanan Budidaya	Ton Ton		Data Kab/Kota dan BP Statistik	Validasi data	Dinas Kelautan dan Perikanan.
2.	Meningkatkan pendapatan usaha kelautan dan perikanan	1. Nilai tukar pelaku usaha kelautan dan Perikanan (NTN)	Nilai Tukar Nelayan ANTN		Data Kab/Kota dan BP Statistik	BP Statistik dan Validasi data	
3.	Meningkatkan ketersediaan pangan	1. Tingkat Konsumsi ikan (Kg/ Kapita/ Tahun)	(Kg/ Kapita/ Tahun)		Data Kab/Kota dan BP Statistik	BP Statistik dan Validasi data	
4.	Meningkatkan Ekspor hasil perikanan	1. Volume Ekspor Perikanan (Kg) 2. Nilai Ekspor Perikanan (US \$)	Kg US \$		Data Kab/Kota dan BP Statistik	BP Statistik dan Validasi data	

1. Nama Unit Organisasi : Dinas Perkebunan

2. Tugas : Membantu Gubernur Provinsi Kalimantan Timur dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan perkebunan.

3. Fungsi : 1. Perumusan kebijakan teknis bidang perkebunan sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah;
2. Perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang perkebunan;
3. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis pengembangan, produksi dan usaha serta perlindungan tanaman perkebunan;
4. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
5. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;

4. Indikator Kinerja Utama :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Alasan	Sumber Data	Cara Perhitungan	Penanggung Jawab
1.	Meningkatnya Produksi Perkebunan Komoditi Kelapa Sawit, Karet, Kakao, Kelapa Dalam, Lada	1. Jumlah Produksi	Ton/Tahun	Produksi hasil perkebunan masih belum optimal dan masih bisa ditingkatkan melalui intensifikasi, ekstensifikasi dan rehabilitasi.	Statistik Perkebunan	Angka kumulatif Kabupaten/Kota Se Kalimantan	Dinas Perkebunan
2.	Meningkatnya Produktivitas Komoditi Kelapa Sawit, Karet, Kakao, Kelapa Dalam, Lada	1. Jumlah Produktivitas	Ton/Ha/Tahun	Produktivitas lahan persatuan luas masing-masing komoditi masih dibawah potensi.	Statistik Perkebunan	Jumlah Produksi dibagi Luas Tanaman Menghasilkan Dikali 1000	
3.	Terbangunnya Kebun Komoditi Kelapa Sawit, Karet, Kakao, Kelapa Dalam, Lada	1. Penambahan Luas Kebun	Hektar	Areal untuk pengembangan perkebunan masih tersedia cukup luas.	Statistik Perkebunan	Angka kumulatif Kabupaten/Kota Se Kalimantan	

1. Nama Unit Organisasi : Dinas Kehutanan.

2. Tugas : Melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kehutanan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

3. Fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang kehutanan sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah;
2. Perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang kehutanan;
3. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis perencanaan dan tata guna tanah;
4. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis produksi dan pemanfaatan hasil hutan;
5. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis peredaran dan industri hasil hutan;
6. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis pembinaan perlindungan hutan;
7. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
8. Pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
9. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;
10. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Indikator Kinerja Utama :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Alasan	Sumber Data	Cara Perhitungan	Penanggung Jawab
1.	Meningkatnya Usaha Ekonomi Produktif di desa sekitar kawasan hutan	1 Jumlah Desa miskin sekitar kawasan hutan yang memiliki usaha ekonomi produktif	Desa	Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan fasilitasi dengan mempertemukan masyarakat Desa dengan Perusahaan Pemegang Ijin pemanfaatan kawasan hutan, untuk menyepakati usaha ekonomi yang akan dikembangkan, selanjutnya perusahaan akan melakukan pembinaan dan pengembangannya.	Renstra Tahun 2013-2018 Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dan Usulan Revisi Renstra Dinas Kehutanan Prov. Kaltim	Jumlah Desa yang telah mengikuti pelatihan / difasilitasi Dinas Kehutanan	Dinas Kehutanan Jawab
2.	Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengendalian kawasan hutan	1 KPH yang dikelola secara mandiri	KPH	Memindaklanjuti peraturan Menteri Kehutanan P.6/menhut-ll/2009 tentang pembentukan wilayah KPH dalam pengelolaan Hutan secara lestari dan dalam pembentukan KPH di Provinsi	Renstra Tahun 2013-2018 Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dan Usulan Revisi Renstra Dinas Kehutanan Prov. Kaltim	Jumlah KPH Provinsi yang telah berfungsi	Dinas Kehutanan Jawab

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Alasan	Sumber Data	Cara Perhitungan	Penanggung Jawab
3.	Berkurangnya luasan lahan kritis pada kawasan hutan dan lahan	1 Luas Rehabilitasi Hutan dan Lahan	HA	1 Luas Hutan dan Lahan yang harus direhabilitasi masih sangat luas 2 Laju kerusakan hutan dan Lahan masih tinggi	Renstra Tahun 2013-2018 Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dan Usulan Revisi Renstra Dinas Kehutanan Prov. Kaltim	Jumlah Luas Penanaman dan Pemeliharaan yang dilaksanakan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur	
4.	Bertambahnya kawasan hutan mangrove pada kawasan hutan maupun diluar kawasan hutan	1 Bertambahnya Tutupan pada kawasan Mangrove	HA	Luas Hutan mangrove yang rusak masih tinggi dan perlu di rehabilitasi	Renstra Tahun 2013-2018 Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dan Usulan Revisi Renstra Dinas Kehutanan Prov. Kaltim	Jumlah Luas Penanaman dan Pemeliharaan di Kawasan Mangrove yang dilaksanakan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur	
5.	Meningkatnya fungsi ekologi, ekonomi dan sosial serta daya dukung DAS dan RTH	1 Penetapan Kawasan - kawasan bernilai Ekosistem Tinggi	Dokumen	Kegiatan awal berupa Penyusunan Dokumen dalam Penetapan lokasi untuk Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi	Renstra Tahun 2013-2018 Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dan Usulan Revisi Renstra Dinas Kehutanan Prov. Kaltim	Jumlah Usulan Penetapan Kawasan Bernilai Ekosistem Tinggi	

1. Nama Unit Organisasi : **Dinas Pertambangan dan Energi**

2. Tugas : Melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pertambangan dan energi berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan

3. Fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang pertambangan dan energi sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah;
2. Perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang pertambangan dan energi;
3. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis pertambangan umum;
4. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis geologis dan sumberdaya mineral;
5. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis listrik dan pemanfaatan energi;
6. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis minyak dan gas bumi;
7. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
8. Pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
9. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;
10. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Indikator Kinerja Utama :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Alasan	Sumber Data	Cara Perhitungan	Penanggung Jawab
1.	Meningkatnya infrastruktur energi dan ketenagalistrikan	1 Rasio elektrifikasi	Persentase	Mengukur tingkat pemenuhan kebutuhan listrik masyarakat.	Laporan Semester/Tahunan PT. PLN, Distamben	$\frac{\text{Jml Rumah Tangga Berlistrik}}{\text{Jml Rumah Tangga}} \times 100\%$	Dinas Pertambangan dan Energi
2.	Terpenuhinya kebutuhan listrik di pedesaan	1 Rasio desa berlistrik	Persentase	Mengukur pemerataan/jangkauan pelayanan listrik bagi masyarakat di pedesaan	Laporan Semester/Tahunan PT. PLN, Distamben	$\frac{\text{Jml Desa Berlistrik}}{\text{Jml Desa}} \times 100\%$	
3.	Meningkatnya keanekaragaman energi pembangkitan	1 Persentase EBT dalam bauran energi pembangkitan	Persentase	Mengukur pemanfaatan sumber energi baru dan terbarukan (EBT)	Laporan Semester/Tahunan PT. PLN, Distamben	$\frac{\text{Jml Daya Terpasang yg bersumber EBT}}{\text{Jml Daya Terpasang}} \times 100\%$	
4.	Terwujudnya rehabilitasi lahan yang terganggu akibat kegiatan pertambangan	1 Persentase area yang direhabilitasi dari lahan terganggu	Persentase	Mengukur Tingkat pemulhan Lahan yang terganggu akibat penambangan.	Laporan Perusahaan Pertambangan, Distamben	$\frac{\text{Jml Area yg direhabilitasi}}{\text{Jml Area lahan terganggu}} \times 100\%$	

1. Nama Unit Organisasi : Dinas Pendapatan Daerah.

2. Tugas : Melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pajak daerah, retribusi dan pendapatan lain-lain, dana perimbangan, perencanaan, pembinaan dan pengawasan pendapatan.

3. Fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang pendapatan daerah sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah;
2. Perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang pajak daerah;
3. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis retribusi dan pendapatan lain-lain;
4. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis dana perimbangan;
5. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis pengembangan pendapatan;
6. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
7. Pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
8. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;
9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Indikator Kinerja Utama :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Alasan	Sumber Data	Cara Perhitungan	Penanggung Jawab	
1.	Meningkatnya Pendapatan Daerah	1. Penerimaan PAD 2. Penerimaan Dana Perimbangan 3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	Rupiah (Rp) Rupiah (Rp)	Mengukur Pendapatan Asli Daerah sebagai cerminan Ekonomi Daerah	- Pendapatan Berjalan	- Tahun	Angka Absolut	Dinas Pendapatan Daerah.
2	Meningkatnya mutu pelayanan pada masyarakat	1. Survey Indeks Kepuasan Masyarakat	Skor					

1. Nama Unit Organisasi : Inspektorat
2. Tugas : Melaksanakan Pengawasan terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintahan di Daerah Provinsi, Pelaksanaan atas Pembinaan Penyelenggaraan dan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan di Daerah Kabupaten/Kota.
3. Fungsi :
 1. Perumusan Kebijakan Bidang Pengawasan sesuai dengan Rencana Strategis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
 2. Pemberian Dukungan atas Perencanaan, Pembinaan dan Pengendalian Kebijakan Teknis dibidang Pengawasan Penyelenggaraan Daerah.
 3. Pemeriksaan, Pengusutan, Pengujian dan Penilaian Tugas Pengawasan Bidang Pembangunan.
 4. Pemeriksaan, Pengusutan, Pengujian dan Penilaian Tugas Pengawasan Bidang Pemerintahan.
 5. Pemeriksaan, Pengusutan, Pengujian dan Penilaian Tugas Pengawasan Bidang Kemasyarakatan.
 6. Penyelenggaraan Urusan Kesekretariatan.
 7. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional.
 8. Pelaksanaan Tugas Lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Indikator Kinerja Utama :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Alasan	Sumber Data	Cara Perhitungan	Penanggung Jawab
1.	Meningkatnya Kualitas laporan Pengprov Kaltim sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	1. Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi	Opini	Memjamin Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi yang sesuai SAP	Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI Atas LKPD Pengprov	Berdasarkan Opini BPK-RI atas LKPD Pengprov pada Buku I	Inspektur
		2. Persentase Laporan Keuangan Pengprov Kaltim dan SKPD sesuai SAP	Persentase	Memjamin Laporan Keuangan Pengprov Kaltim dan SKPD sesuai SAP	Laporan Hasil Pemeriksaan SKPD	Membanding laporan keuangan yang direviu dengan kesesuaian SAP yang meliputi relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami	Inspektur
2.	Menurunkan kasus dan penyimpangan yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan	1. Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat yang ditangani	Persentase	Melakukan pemeriksaan atas pengaduan dalam rangka mencari kebenaran	Laporan Hasil Pemeriksaan Pengaduan	Jumlah pengaduan yang masuk / Jumlah pengaduan yang ditangani x 100%	Inspektur
		2. Jumlah kasus KKN dilingkungan Pengprov Kaltim	Kasus	Melakukan pemeriksaan atas kasus/pengaduan masyarakat terkait KKN	Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus/Kasus/T tertentu	Jumlah kasus KKN	
		3. Jumlah Pelanggaran Disiplin Pegawai	Kasus	Melakukan pemeriksaan masyarakat terkait pelanggaran PP No. 50 Tahun 2010	Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus/Kasus/ Tertentu	Jumlah kasus Pelanggaran Disiplin sesuai PP No. 53 Tahun 2010	

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Alasan	Sumber Data	Cara Perhitungan	Penanggung Jawab
		4. Jumlah SKPD yang ditetapkan sebagai Zona Integritas Menuju WBK/WBBM	SKPD	Melakukan evaluasi atas Lembar Kerja Evaluasi (LKE) ZI menuju WBK/WBBM sesuai dengan Permenpan No. 52 Tahun 2014	Laporan Hasil Evaluasi atas LKE	Hasil Evaluasi atas LKE	
3.	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah berdasarkan hasil audit dan evaluasi APIP	1. Skor rata-rata hasil evaluasi akuntabilitas kinerja SKPD	Skor	Mengukur tingkat capai rata-rata SAKIP SKPD	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP SKPD	Capaian rata-rata unsur penilaian dalam Laporan hasil evaluasi LAKIP SKPD	Inspektur
		2. Skor rata-rata hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Kab/Kota	Skor	Mengukur tingkat capai rata-rata SAKIP Kab/Kota	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Kab/Kota	Laporan hasil evaluasi LAKIP Kab/Kota	Inspektur
		3. Persentase LPPD Kab/Kota yang mendapat nilai sangat tinggi	Persentase	Mengukur capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kab/Kota	Laporan Hasil Evaluasi LPPD Kab/Kota	Hasil evaluasi LPPD Kab/Kota	
4.	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan	1. Persentase tindak lanjut hasil pengawasan	Persentase	Mengukur tingkat ketepatan entitas/ obrik terhadap tindak lanjut hasil pengawasan	Hasil monitoring dan evaluasi tindak lanjut pengawasan	Capaian hasil tindak lanjut yang sesuai dengan rekomendasi	Inspektur
5.	Meningkatnya koordinasi dan sinergitas pelaksanaan pengawasan	1. Cakupan Pengawasan yang akan dicapai	Persentase	Mengukur tingkat capaian telah dilaksanakan	Hasil evaluasi pelaksanaan pengawasan	Kegiatan pengawasan yang telah dicapai dibandingkan dengan program pengawasan yang telah ditetapkan	Inspektur
6.	Terlaksananya Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	1. Skor rata-rata Penerapan SPIP SKPD	Skor	Mengukur tingkat penerapan pengendalian intern yang dilaksanakan SKPD	Laporan Evaluasi Penerapan SPIP.	Capaian Rata-rata unsur-unsur penerapan SPIP	Inspektur

1. Nama Unit Organisasi : Bappeda Provinsi Kalimantan Timur

2. Tugas : Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan dan statistik daerah.

3. Fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan dan statistik daerah sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
2. PEMBERAN DUKUNGAN ATAS PERENCANAAN, PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN KEBIJAKAN TEKNIS BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN STATISTIK DAERAH;
3. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis bidang ekonomi;
4. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang pengembangan sumber daya manusia;
5. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang pemerintahan dan aparatur;
6. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang prasarana dan pengembangan wilayah;
7. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang statistik dan pengendalian pembangunan;
8. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang pengkajian dan pembiayaan pembangunan daerah
9. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
10. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;
11. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

4. Indikator Kinerja Utama :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Alasan	Sumber Data	Cara Perhitungan	Penanggung Jawab
1.	Tercapainya integrasi dan sinkronisasi antar fungsi perencanaan dan penganggaran	1. Persentase efektivitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase	Mengukur efektivitas dalam perencanaan pembangunan daerah	SK Tim Penyusun RKP, RKP, Rancangan Awal RKP, Rancangan Akhir RKP, Pergub RKP, absensi RKP dan Nilai Pihak-pihak yang terlibat Konsultasi Publik, Forum SKPD dan Musrenbang RKP	Prosentase rata-rata dari penjumlahan Nilai Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen RKP ditambah Nilai Tahapan Kegiatan dalam Penyusunan Dokumen RKP dan Nilai Pihak-pihak yang terlibat dalam setiap tahapan kegiatan Penyusunan RKP	BAPPEDA Jawab
		2. Persentase integrasi pembangunan Katim pada regional Kalimantan	Persentase	Mengukur efektivitas peran dalam pembangunan daerah yang dibiayai dana APBD	Buku usulan FKR2RK dan Buku Kerja FKR2RK	Prosentase Jumlah Usulan Prov. Katim untuk pada Usulan Forum Kejasama Revitalisasi dan Percepatan Pembangunan Regional Kalimantan (FKRP2RK) yang masuk dalam APBN	

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Alasan	Sumber Data	Cara Perhitungan	Penanggung Jawab
		3. Persentase kesesuaian DPA dengan RKPD	Persentase	Mengukur konsistensi antara perencanaan dan penganggaran	Pergub RKPD dan Dokumen Anggaran (DPA)	Jumlah Program Kegiatan di DPA yang terdapat pada RKPD dibagi dengan Jumlah Program Kegiatan di DPA dikali 100	
2.	Meningkatnya kualitas data/informasi dan spasial serta fungsi peran koordinasi pembangunan daerah	1. Tingkat ketersediaan data dan informasi perencanaan pembangunan 2. Persentase koordinasi perencanaan pembangunan		Mengukur ketersediaan data dan informasi yang dijadikan dasar perencanaan pembangunan Mengukur peran perencanaan dalam berkoordinasi dengan pihak-pihak yang terlibat dalam perencanaan pembangunan daerah	Dokumen Dokumen Data Pembangunan Kalimantan Timur Dokumen Rencana Renja, Renjal SKPD, UPPN, Daftar Absen Rakor Bappeda se-Kaltim, Konsultasi Publik, Rakor Program Prioritas, Forum SKPD dan Musrenbang RKPD	Rata-rata antara Prosentase Jumlah Data Pembangunan yang tersedia dibagi total Jumlah Data Pembangunan Kaltim Prosentase rata-rata dari penjumlahan pihak-pihak yang terlibat dalam koordinasi perencanaan pembangunan	
3.	Tercapainya sasaran RPJMD Provinsi Kaltim	1. Persentase pencapaian RKPD terhadap sasaran RPJMD		Mengukur capaian rencana pembangunan tahunan terhadap rencana pembangunan jangka menengah	Laporan Hasil Evaluasi Hasil RKPD terhadap RPJMD.	Rata-rata capaian Indikator sasaran RPJMD Tahun ke-n	

1. Nama Unit Organisasi : **Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah**
2. Tugas : **Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penelitian dan pengembangan kesejahteraan rakyat dan masyarakat, pemerintahan dan aparatur, ekonomi dan pembangunan, serta sumber daya alam dan teknologi.**
3. Fungsi :
 1. Perumusan kebijakan teknis di bidang penelitian dan pengembangan sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
 2. Pemberian dukungan atas perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang penelitian dan pengembangan;
 3. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis penelitian dan pengembangan di bidang kesejahteraan rakyat dan masyarakat;
 4. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dan aparatur;
 5. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi dan pembangunan;
 6. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis penelitian dan pengembangan di bidang sumber daya alam dan teknologi;
 7. Penyelenggaraan urusan sekretariat;
 8. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;
 9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Indikator Kinerja Utama :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Alasan	Sumber Data	Cara Perhitungan	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya kualitas penelitian dan pengembangan Bidang Sumber Daya Alam (SDA) dan Teknologi	1. Persentase litbang Bidang Sumber Daya Alam (SDA) dan Teknologi yang dilaksanakan dan dimanfaatkan dalam mendukung kebijakan Pembangunan Daerah	Persentase	Untuk mengukur efektifitas pelaksanaan litbang yang dimanfaatkan dalam mendukung kebijakan pembangunan daerah.	RPJMD - RKPMD - RKPDP - Renstra - Renja - LKJIP - Laporan Tahunan - Laporan Kegiatan	Jumlah Litbang Bidang SDA & Teknologi yang dimanfaatkan dibagi jumlah Litbang Bidang SDA & Teknologi X 100 %	Badan Penelitian dan Pengembangan an Daerah
2	Meningkatnya kualitas penelitian dan pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	1. Persentase litbang Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang dilaksanakan dan dimanfaatkan dalam mendukung kebijakan Pembangunan Daerah	Persentase			Jumlah Litbang Bidang Ekonomi & Pembangunan yang dimanfaatkan dibagi jumlah Litbang Bidang Ekonomi & Pembangunan X 100 %	

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Alasan	Sumber Data	Cara Perhitungan	Penanggung Jawab
3	Meningkatnya kualitas penelitian dan pengembangan Bidang Kesra dan Kemasyarakatan	1 Persentase Iltbang Bidang Kesra dan Kemasyarakatan yang dilaksanakan dan dimantapkan dalam mendukung kebijakan Pembangunan Daerah	Persentase			Jumlah Iltbang Bidang Kesra & Kemasyarakatan yang dimanfaatkan dibagi jumlah Iltbang Bidang Kesra & Kemasyarakatan X 100 %	
4	Meningkatnya kualitas penelitian dan pengembangan Bidang Pemerintahan dan Aparatur	1 Persentase Iltbang Bidang Pemerintahan dan Aparatur yang dilaksanakan dan dimantapkan dalam mendukung kebijakan Pembangunan Daerah	Persentase			Jumlah Iltbang Bidang Pemerintahan & Aparatur yang dimanfaatkan dibagi jumlah Iltbang Bidang Pemerintahan & Aparatur X 100 %	
5	Meningkatnya kualitas pelayanan laboratorium bidang konstruksi	1 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Laboratorium Pengujian Bidang Konstruksi	Indeks	Untuk mengukur kepuasan masyarakat terhadap pelayanan laboratorium Bidang Konstruksi		Survey Indeks Kepuasan Masyarakat	

1. Nama Unit Organisasi : **Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**

2. Tugas : Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Kesatuan bangsa, politik dalam negeri, pembinaan ideologi wawasan kebangsaan dan kewaspadaan, ketahanan sosial, penanganan bencana dan konflik.

3. Fungsi :
1. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
2. Pemberian dukungan atas perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang kesatuan bangsa dan politik;
3. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang politik dalam negeri;
4. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang pembinaan ideologi wawasan kebangsaan dan kewaspadaan;
5. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang ketahanan sosial dan ekonomi;
6. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang penanganan bencana dan konflik;
7. Penyelenggaraan urusan sekretariat;
8. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;
9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Indikator Kinerja Utama :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Alasan	Sumber Data	Cara Perhitungan	Penganggung Jawab
1.	Mewujudkan sistem demokrasi yang kondusif diwilayah Kalimantan Timur	1. Indeks Demokrasi Indonesia Kalimantan Timur	Indeks	Dalam Penyusunan Indeks Demokrasi Indonesia ada 28 Indikator yang menjadi alat ukur, yang kesemuanya merupakan indikator dari pelaksanaan tugas Badan Kesbangpol Prov. Kaltim	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2.	Mewujudkan Kondusifitas di Daerah dengan mensinergikan Peran - Peran masyarakat dan pemerintahan dalam pembangunan	1. Penurunan Jumlah Konflik	%		Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

1. Nama Unit Organisasi : **Badan Lingkungan Hidup**
2. Tugas : **Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengendalian dampak lingkungan hidup.**
3. Fungsi :
 1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian dampak lingkungan daerah sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
 2. Pemberian dukungan atas perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang pengendalian dampak lingkungan daerah;
 3. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang pengendalian dampak lingkungan;
 4. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang pengendalian pencemaran;
 5. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang pengendalian kerusakan;
 6. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang pengembangan;
 7. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
 8. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;
 9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Indikator Kinerja Utama :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Alasan	Sumber Data	Cara Perhitungan	Penanggung Jawab
1.	Meningkatnya Upaya pencegahan, pengawasan dan pengendalian pengelolaan Lingkungan Hidup.	1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	Mengukur tingkat pelayanan badan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur kepada Masyarakat dengan meningkatkan ketersediaan Infrastruktur baik secara kualitas maupun kuantitas yang lebih difokuskan kepada pengelolaan SDA serta perbaikan kualitas lingkungan	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) = Jumlah Indeks Pencemaran Air (IPA) + Indeks Pencemaran Udara (IPU) + Indeks Tutupan Hutan / Lahan (IPH) dibagi 3 $K = \frac{IPA + IPU + IPH}{3}$	Badan Lingkungan Hidup
2.	Meningkatkan Penerapan Sanksi Hukum bagi Pelaku Pencemar Lingkungan Hidup	1. Prosentase tingkat perusahaan yang dinilai / di Proper	Persentase	Mengukur Upaya pencegahan, pengawasan dan pengendalian pengolahan lingkungan hidup	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan	Prosentase tingkat perusahaan yang dinilai / di proper = Jumlah perusahaan yang mentaati persyaratan administrative dan teknis pengelolaan lingkungan hidup dibanding jumlah perusahaan yang diawasi / dinilai dikali 100% Atau : $K = \frac{\text{Jumlah perusahaan dinilai}}{\text{Jumlah perusahaan}} \times 100\%$	
3.	Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca	1. Intensitas Emisi	CO2 equivalent	Mengukur Intensitas emisi dari gas rumah kaca	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan	Emisi BAU / Emisi Aktual	

1. Nama Unit Organisasi : **Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan**
2. Tugas : **Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Ketahanan pangan dan penyuluhan.**
3. Fungsi :
 1. Perumusan kebijakan teknis di bidang ketahanan pangan dan penyuluhan daerah sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
 2. Pemberian dukungan atas perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang ketahanan pangan dan penyuluhan;
 3. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang ketersediaan, kerawanan dan distribusi pangan;
 4. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang konsumsi dan keamanan pangan;
 5. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang penyuluhan;
 6. Penyelenggaraan urusan kesekretaratan;
 7. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;
 8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Indikator Kinerja Utama :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Alasan	Sumber Data	Cara Perhitungan	Penanggung Jawab
1	Peningkatan ketersediaan energi dan protein	1 Jumlah ketersediaan kalori	Kkal/kap/hrp	Mengukur tingkat ketersediaan pangan dan kandungan energi dari pangan yang tersedia	Laporan BKPP	$\frac{\text{Ketersediaan Pangan}}{\text{Kap/hr}} \times \text{Kandungan Kalori} \times \text{BDD}$	
		2 Jumlah ketersediaan protein	Gram/kap/hr			$\frac{\text{Ketersediaan Pangan}}{\text{kap/hr}} \times \text{Kandungan Kalori} \times \text{BDD}$	
2	Ketersediaan pangan pemerintah	1 Jumlah ketersediaan pangan pemerintah setara beras	Ton/thn		Cadangan Pemerintah Prov. Kaltim	$\frac{\text{Ketersediaan (CPP)}}{\text{Kebutuhan Pangan}} \times \text{Orang/Hari} \times \text{2 bulan}$	

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Alasan	Sumber Data	Cara Perhitungan	Penanggung Jawab
3	Peningkatan konsumsi energi dan protein	1 Jumlah konsumsi kalori minimal	Kkal/kap/ht	Untuk mengukur tingkat konsumsi pangan penduduk dalam jumlah dan mutu pangan yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan pada waktu tertentu	BPS, BPOM dan BKPP Kab/kota	$\text{Konsumsi Pangan /kap} \times \text{Kandungan Kalori} \times \text{BDD}$	
		2 Jumlah konsumsi protein minimal	Gram/kap/hr			$\text{Ketersediaan Pangan /kap /hr} \times \text{Kandungan Kalori} \times \text{BDD}$	
4	Penurunan konsumsi beras per kapita per tahun	1 Jumlah konsumsi beras	Kg/kap/tn			$113 \text{ kg} - (113 \text{ kg} \times \frac{1.5}{100})$	
5	Stabilitas harga pangan	1 % Stabilitas harga pangan	Persentase	Mengukur kestabilan harga pangan dan pasokan pangan masyarakat dalam jumlah yang tepat	Bulog, enumerator kab/kota	$\frac{\text{Selisih kenaikan harga bulan sebelumnya}}{\text{harga bulan sebelumnya}} \times 100\%$	
6	Stabilitas pasokan pangan	1 % Stabilitas pasokan pangan	Persentase		Bulog dan BKPP	$\frac{\text{Realisasi Pasokan}}{\text{Target Pasokan}} \times 100\%$	

1. Nama Unit Organisasi : **Badan Perpustakaan.**
2. Tugas : Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perpustakaan.
3. Fungsi :
 1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Perpustakaan sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
 2. Pemberian dukungan atas perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang Perpustakaan;
 3. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang deposit dan akuisi bahan pustaka;
 4. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang layanan informasi dan otomasi perpustakaan;
 5. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang pengembangan dan pembinaan;
 6. Penyelenggaraan urusan kesekretarian;
 7. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;
 8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Indikator Kinerja Utama :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Alasan	Sumber Data	Cara Perhitungan	Penanggung Jawab
1.	Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Perpustakaan yang ditandai oleh meningkatnya budaya baca, standar mutu perpustakaan dan kompetensi SDM disemua jenis Perpustakaan serta kualitas koleksi bahan pustaka	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase pengunjung yang meminjam 2. Survey Indeks Kepuasan Masyarakat 3. Persentase perpustakaan yang terakreditasi 	Persentase	<p>Makin banyak pemustaka yang menggunakan jasa layanan perpustakaan dengan baik dan benar, dengan kepuasan pelayanan maka semakin meningkat pemustaka/Masyarakat</p> <p>Dengan adanya Survey Indeks Kepuasan masyarakat mampu mengetahui kebutuhan pemustaka. Tingkat capaian dan tindak lanjut yang dibutuhkan dalam upaya peningkatan</p> <p>Terselenggaranya aspek-aspek perpustakaan sesuai standar Nasional Indonesia (SNI) meliputi Perpustakaan Umum, Perpustakaan Khusus, Perpustakaan Sekolah dan Perpustakaan Perguruan Tinggi.</p>	Data Jumlah pengunjung yang berkunjung ke Badan Perpustakaan dan Jumlah peminjaman bahan pustaka di perpustakaan	$\frac{\text{Peminjau Buku}}{\text{Pengunjung}} \times 100\%$ $\frac{\text{Perpustakaan yang terakreditasi}}{\text{Jumlah perpustakaan}} \times 100\%$	Badan Perpustakaan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Alasan	Sumber Data	Cara Perhitungan	Peranggung Jawab
		4. Presentase Koleksi Deposit dan Lokal Kalimantan	Presentase	Tingginya kebutuhan pemustaka untuk koleksi deposit	Data jumlah koleksi deposit dan lokal kalim	$\frac{\text{Koleksi konten lokal Kalimantan yg dapat diestartikan}}{\text{Jumlah koleksi deposit}} \times 100\%$	

1. Nama Unit Organisasi : **Badan Arsip Daerah**
2. Tugas : **Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Kearsipan.**
3. Fungsi :
 1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Kearsipan sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
 2. Pemberian dukungan atas perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang Kearsipan dan dokumentasi;
 3. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang akuisisi dan pengelolaan arsip;
 4. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang layanan kearsipan;
 5. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang pembinaan dan pengembangan kearsipan;
 6. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
 7. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;
 8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Indikator Kinerja Utama :

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Alasan	Sumber Data	Cara Perhitungan	Penanggung Jawab
1.	Meningkatkan Penyelenggaraan Kearsipan Provinsi	1. Prosentase SKPD dilingkungan Provinsi yang pengelolaan asipnya memenuhi kriteria lebih dari atau sama dengan C	Prosentase	Menghitung jumlah SKPD yang memenuhi Kriteria C berdasarkan hasil asistensi dan penilaian Tata Kelola Kearsipan yang dilaksanakan terhadap seluruh SKPD di lingkungan	Hasil asistensi ke 52 SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur	Kriteria C berdasarkan pengukuran bila prosentase bobot penilaian Tata Kelola Kearsipan >= 50%	Badan Arsip Daerah
		2. Prosentase LKD Kabupaten/Kota yang memenuhi kriteria lebih dari atau sama dengan C	Prosentase	Kriteria C berdasarkan hasil monitoring dan penilaian Tata Kelola Kearsipan terhadap Lembaga Kearsipan Daerah tingkat Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur	Hasil monitoring terhadap LKD Kabupaten/ Kota se-Kalimantan Timur	Kriteria C berdasarkan pengukuran bila prosentase bobot penilaian hasil Monitoring dan Evaluasi terhadap LKD Kab/Kota hasilnya >= 50%	Adapun komponen penilaian terdiri dari : - Kebijakan 22% - Pembinaan 22 % - Pengl Arsip Dinamis 18,7% - Pengl Arsip Vital 4%

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Alasan	Sumber Data	Cara Perhitungan	Penanggung Jawab
						<ul style="list-style-type: none"> - Pengl Arsip Statis 9,10% - Kelembagaan 16,90% - Program Pemerintah Pusat 4,90% - Program Lainnya 4 % 	
2.	Meningkatkan Pemdayagunaan Arsip sebagai Sumber Informasi	1. Prosentase retrieval arsip yang sesuai dengan kebutuhan pengguna arsip	Persentase	Mengukur prosentase angka temu balik arsip yang sesuai dengan kebutuhan Pengguna Arsip.	<ul style="list-style-type: none"> - Lembar pemesanan arsip - Bukti peminjaman arsip - Laporan layanan peminjaman arsip - Angket quisioner pengguna arsip 	Angka peminjam arsip yang sesuai dgn kebutuhan dibagi jumlah peminjam arsip di kali 100%	

1. Nama Unit Organisasi : **Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.**
2. Tugas : **Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa.**
3. Fungsi :
 1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
 2. Pemberian dukungan atas perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa.
 3. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang ketahanan dan sosial budaya masyarakat.
 4. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang ekonomi masyarakat.
 5. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang teknologi tepat guna.
 6. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang pemerintahan desa.
 7. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan.
 8. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional.
 9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Indikator Kinerja Utama :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Alasan	Sumber Data	Cara Perhitungan	Penanggung Jawab
1.	Meningkatnya masyarakat miskin perdesaan yang mandiri melalui pemanfaatan TTG, penguatan kelembagaan masyarakat dan Pemerintahan Desa, Usaha Ekonomi Masyarakat dan Program PNPM Mandiri perdesaan	Jumlah masyarakat miskin yang mandiri memiliki kemampuan melalui pemanfaatan TTG, penguatan kelembagaan masyarakat dan Pemerintahan Desa, Usaha Ekonomi Masyarakat dan Program PNPM mandiri perdesaan		Meningkatnya masyarakat miskin yang mandiri	Laporan Kab/Kota se-Kaltim	Rekapitulasi hasil laporan Kab/Kota dan hasil Monev, serta Pelatihan	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.
2.	Meningkatnya Pelayanan Aparatur Desa dan Kelurahan	Persentase Desa dan Kelurahan yang memiliki Pelayanan Prima		Pelayanan aparatur Desa dan Kelurahan meningkat	Hasil survey	$\frac{\text{Jumlah Pelayanan Prima yg aktif Desa/Kel se Kaltim}}{\text{Jumlah Desa/Kel se Kaltim}} \times 100\%$	

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Alasan	Sumber Data	Cara Perhitungan	Penanggung Jawab
3	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	1 Persentase Desa dan Kelurahan yang berhasil dalam melaksanakan Pembangunan		Meningkatnya Desa/Kelurahan yang maju dan mandiri	Hasil profil Desa/Kelurahan dan hasil lomba Desa/Kelurahan	Jumlah Desa/Kelurahan yang mampu membuat Profil Desa/Kelurahan	
4	Meningkatnya Kualitas Lembaga Ekonomi Masyarakat	Jumlah Lembaga Ekonomi Masyarakat yang aktif :		Pertumbuhan Usaha Ekonomi Masyarakat dan PADesal/Kampung meningkat	Hasil survey	BUMDes Aktif _____ x 100%	
		1 Jumlah BUMDes Aktif				Desa/Kel se Kalim _____ x 100%	
		2 Jumlah Pasar Desa Aktif				Pasar Desa Aktif _____ x 100%	
		3 Jumlah CPPD Aktif				CPPD Aktif _____ x 100%	
5	Meningkatnya Kualitas Lembaga Pelayanan Teknologi / Warung Teknologi Perdesaan	Jumlah Kelembagaan Posyantik/Warek yang aktif	Jumlah Kelompok Prasarana dan Sarana Perdesaan yang aktif	Masyarakat memperoleh wadah pelayanan informasi dan promosi berbagai jenis Teknologi Tepat Guna (TTG)	Laporan Kab/Kota se-Kalim dan Hasil pemetaan	Rekapitulasi hasil laporan Kab/Kota dan hasil Money dan Pelatihan	Rekapitulasi hasil laporan Kab/Kota, Pemetaan Posyantek dan TTG Unggulan di Kalim, serta Money : Pelatihan

1. Nama Unit Organisasi : **Badan Kepegawaian Daerah**
2. Tugas : Membantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintah Provinsi dalam bidang Kepegawaian.
3. Fungsi :
 1. Perumusan kebijakan teknis di bidang kepegawaian daerah sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
 2. Pemberian dukungan atas perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang kepegawaian daerah;
 3. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang mutasi;
 4. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang pengembangan;
 5. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang pembinaan;
 6. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang dokumentasi dan informasi;
 7. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
 8. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;
 9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Indikator Kinerja Utama :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Alasan	Sumber Data	Cara Perhitungan	Penanggung Jawab
1.	Meningkatnya Kualitas Pegawai	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase Pegawai yang menempati Jabatan sesuai dengan kompetensi 2. Persentase Pegawai Yang telah mengikuti diklat teknis dan Fungsional 3. Persentase pegawai yang telah menempuh pendidikan formal 4. Persentase pengadaan pegawai pada SKPD sesuai dengan Kompetensi 	<p>Persentase</p> <p>Persentase</p> <p>Persentase</p> <p>Persentase</p>	<p>Mengukur jumlah pegawai yang menempati Jabatan sesuai dengan kompetensi sebagai upaya dalam menghadapi pemberlakuan UU ASN</p> <p>Mengukur Pegawai Yang telah mengikuti diklat teknis dan Fungsional</p> <p>Mengukur pegawai yang telah menempuh pendidikan formal</p> <p>Mengukur pemenuhan kebutuhan pegawai baru dengan kualifikasi tertentu</p>	<p>Laporan Tahunan Bidang Pengembangan</p> <p>Laporan Tahunan Bidang Pengembangan</p> <p>Laporan Tahunan Bidang Pengembangan</p>	<p>Jabatan sesuai dengan kompetensi $\frac{\text{Seluruh Jumlah Jabatan}}{\text{Jumlah pegawai yang mengikuti diklat seluruh jumlah pegawai}} \times 100\%$</p> <p>Pegawai yang mengikuti pendidikan formal $\frac{\text{Seluruh Jumlah Pegawai}}{\text{Pegawai yang mengikuti pendidikan formal}} \times 100\%$</p> <p>Jumlah pengadaan CPNS dengan kualifikasi tertentu $\frac{\text{Seluruh Jumlah Pegawai}}{\text{Jumlah pengadaan CPNS dengan kualifikasi tertentu}} \times 100\%$</p>	Badan Kepegawaian Daerah

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Alasan	Sumber Data	Bidang	Cara Perhitungan	Penanggung Jawab
2.	Meningkatnya Kesejahteraan Pegawai	5. Persentase pemberian kesejahteraan pegawai	Persentase	Mengukur Jumlah PNS yang memperoleh Kesejahteraan atas Kinerjanya	Laporan Tahunan Pembinaan	Bidang	$\frac{\text{Jumlah pegawai yang memperoleh Kesejahteraan}}{\text{Seluruh Jumlah Pegawai}} \times 100\%$	
		6. Persentase pemberian penghargaan pegawai		Mengukur Jumlah PNS yang memperoleh penghargaan atas Kinerjanya	Laporan Tahunan Pembinaan	Bidang	$\frac{\text{Jumlah pegawai yang memperoleh Penghargaan}}{\text{Seluruh Jumlah Pegawai}} \times 100\%$	
3.	Meningkatnya Kualitas Administrasi Kepegawaian	7. Persentase penyelesaian SK kenalkian pangkat tepat waktu	Persentase	Mengukur Kecepatan, ketepatan terhadap layanan administrasi kepegawaian	Laporan Tahunan Mutasi	Bidang	$\frac{\text{Jumlah SK yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah keseluruhan pengajuan SK Kenalkian Pangkat}} \times 100\%$	
		8. Persentase Data Pegawai yang akurat	Persentase	Mengukur Jumlah Data Pegawai yang tepat dan akurat	Laporan Tahunan Ditro	Bidang	$\frac{\text{Jumlah data pegawai yang terupdate}}{\text{Seluruh Jumlah Pegawai}} \times 100\%$	
		9. Indeks Kepuasan Masyarakat (Pegawai)	skor	Mengukur tingkat Kepuasan masyarakat (pegawai) dilindungi Pemprov. Katim terhadap Pelayanan BKD Prov. Katim	Laporan Tahunan Sekretariat	Bidang	$\frac{\text{survey Indeks kepuasan masyarakat (pegawai)}}{\text{Prediktor nilai}} \times 100\%$	

1. Nama Unit Organisasi : **Badan Pendidikan dan Pelatihan**
2. Tugas : **Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pendidikan dan Pelatihan.**
3. Fungsi :
 1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan dan pelatihan sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
 2. Pemberian dukungan atas perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang pendidikan dan pelatihan;
 3. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang pengkajian dan pengembangan diklat;
 4. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang diklat penjenjangan;
 5. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang diklat teknis dan fungsional;
 6. Penyelenggaraan urusan sekretariat;
 7. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;
 8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Indikator Kinerja Utama :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Alasan	Sumber Data	Cara Perhitungan	Penanggung Jawab
1.	Meningkatnya Kualitas SDM Aparatur dalam penyelenggaraan diklat.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase Tingkat Kepuasan peserta terhadap penyelenggaraan diklat. 2. Persentase Lulusan Diklat Kepernimpinan dengan Predikat minimal Memuaskan. 3. Persentase Diklat Teknis dan Fungsional yang memenuhi Standar Kompetensi 	Persentase	Mengukur hasil kepuasan peserta diklat TF dan diklat penjenjangan	Renstra, Hasil Laporan Tahunan	Survey tingkat kepuasan peserta diklat	Badandiklat
			Persentase	Mengukur hasil lulusan diklat penjenjangan dengan predikat memuaskan	Renstra, Hasil Laporan Tahunan	Rumus = Jumlah Peserta Diklat dengan Predikat Memuaskan / Jumlah peserta diklat keseluruhan X 100%	
			Persentase	Mengukur hasil diklat TF yang memenuhi Standar Kompetensi	Renstra, Hasil Laporan Tahunan	Rumus = Jumlah Diklat Teknis dan Fungsional yang memenuhi Standar Kompetensi / Jumlah Diklat Teknis dan Fungsional yg dilaksanakan X 100%	

1. Nama Unit Organisasi : **Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana**
2. Tugas : **Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana.**
3. Fungsi :
 1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
 2. Pemberian dukungan atas perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang peningkatan kualitas hidup perempuan.
 3. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang perlindungan perempuan dan anak.
 4. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera.
 5. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan.
 6. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional.
 7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Indikator Kinerja Utama :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Alasan	Sumber Data	Cara Perhitungan	Penanggung Jawab
1.	Mendorong penurunan tingkat kemiskinan perempuan	1. Prosentase perempuan miskin yang memiliki usaha ekonomi produktif	Persentase	Meningkatkan pertumbuhan usaha ekonomi produktif bagi perempuan	Dinsos dan BPPKB Prov. Kaltim	$\frac{\text{Jumlah penduduk perempuan miskin di Kaltim}}{\text{Jumlah penduduk perempuan di Kaltim}} \times 100\%$	Badan Pemberdayaan an Perempuan dan Keluarga Berencana
2.	Meningkatnya kebijakan pelaksanaan tumbuh kembang perlindungan dan pemenuhan hak anak pada Provinsi / Kab / Kota	1. Persentase anak putus sekolah kembali bersekolah 2. Prosentase perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapat penanganan	Persentase Persentase	Mengukur hak pendidikan anak Perlindungan kepada korban kekerasan perempuan dan anak	BPS, Disdik, Dinsos dan BPPKB Prov. Kaltim P2TP2A Prov. Kaltim dan BPPKB Prov. Kaltim	$\frac{\text{Jumlah anak putus sekolah kembali bersekolah}}{\text{Jumlah anak putus sekolah}} \times 100\%$ $\frac{\text{Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapat penanganan}}{\text{Jumlah kasus}} \times 100\%$	
3.	Mendorong pembangunan yang berkeadilan	1. Indeks Pembangunan Gender (IPG)	nilai	Peningkatan kualitas hidup perempuan dari sisi ekonomi, sosial dan pendidikan	BPS dan BPPKB Prov. Kaltim	Jumlah Nilai	

1. Nama Unit Organisasi : **Kantor Penghubung**

2. Tugas : Kantor Penghubung mempunyai tugas pokok melaksanakan penyelenggaraan kegiatan Hubungan Antar Lembaga, Pembinaan Masyarakat Kalimantan Timur di Jakarta, promosi dan pengelolaan Anjungan Kalimantan Timur di TMI, pelayanan kepada Pejabat Daerah dan Pengelolaan Mess Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur di Jakarta.

3. Fungsi :

1. Perumusan kebijakan Kantor Penghubung sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan pemerintah daerah;
2. Penyusunan rencana program kerja Kantor Penghubung;
3. Penyelenggaraan kerja sama di bidang hubungan antar lembaga;
4. Penyelenggaraan pelayanan penunjang terhadap perangkat daerah yang bertugas di Jakarta, dan pembinaan masyarakat Kalimantan Timur di Jakarta;
5. Pengelolaan Anjungan Daerah Kalimantan Timur di Taman Mini Indonesia Indah;
6. Pengelolaan Mess Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur di Jakarta;
7. Melaksanakan urusan ketatausahaan;
8. Pembinaan kelompok Jabatan Fungsional;
9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Indikator Kinerja Utama :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Alasan	Sumber Data	Cara Perhitungan	Penanggung Jawab
1.	Meningkatnya pelayanan Kantor Penghubung	1. Persentase komplain/keuhlan Pejabat Pusat/Daerah yang ditindaklanjuti	Persentase	Untuk menggambarkan terhadap komplain/keuhlan pelayanan Kantor penghubung Kaltim yang tidak/ kurang memuaskan melalui Form Keuhlan/Saran	Laporan komplain/keuhlan beserta tindak lanjut	Jumlah Keuhlan yang ditindaklanjuti / Jumlah Keuhlan * 100%	Kantor Penghubung
		2. Nilai Konversi IKM Pelayanan Mess	Skor IKM	Untuk menggambarkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan mess Kantor Penghubung Kaltim	Laporan rekap data hasil kuesioner tamu mess	Tabel Pengolahan IKM per Responden per Unsur Pelayanan	
		3. Penerimaan retribusi mess	Rupiah	Menggambarakan penerimaan daerah Kaltim melalui retribusi mess	Laporan jumlah tamu dan retribusi mess	Jumlah tamu * Jumlah Hari Menginap * Harga Kamar	
		4. Tingkat bunian mess	Orang	Menggambarakan jumlah tamu yang menginap di mess Kantor Penghubung Kaltim	Jumlah tamu yang menginap	Jumlah tamu yang menginap	
2.	Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan yang berkunjung ke Anjungan Kaltim TMI	1. Tingkat kunjungan wisatawan	Orang	Menggambarakan jumlah kunjungan wisatawan yang berkunjung ke Anjungan Kaltim TMI	Buku Tamu pengunjung Anjungan Kaltim TMI	Jumlah wisatawan yang berkunjung	

1. Nama Unit Organisasi : **Rumah Sakit Umum Daerah.**
2. Tugas : Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang pelayanan kesehatan paripurna, pendidikan dan pelatihan.
3. Fungsi :
 1. Perumusan kebijakan teknis bidang pelayanan kesehatan paripurna, pendidikan dan penelitian sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
 2. Pemberian dukungan atas perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan bidang kesehatan paripurna, pendidikan dan penelitian;
 3. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian urusan umum dan keuangan;
 4. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian pelayanan bidang medik dan keperawatan;
 5. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian, penunjang dan pengembangan sumber daya manusia serta peningkatan mutu;
 6. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;
 7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

4. Indikator Kinerja Utama :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Alasan	Sumber Data	Cara Perhitungan	Penanggung Jawab
1.	Meningkatkan kompetensi SDM	1. Index Patient Safety	Persentase	Meningkatkan kompetensi SDM, ketersediaan Sarana dan prasarana serta sistem Manajemen dan keuangan	Bagian Pelayanan Medis	$\frac{\sum \text{Telusur pasien safety yang memenuhi standar}}{\sum \text{elemen penilaian pasien safety}} \times 100\%$	Rumah Sakit Umum Daerah.
2.	Meningkatkan Kapasitas Saprass	1. Persentase unit pelayanan yang memiliki Respon Time sesuai standar	Persentase	Menilai kemampuan mutu pelayanan pada unit berdasarkan respon time	Bagian Pelayanan	$\frac{\sum \text{Respon pada unit yang disurvei selama 1 bulan}}{\sum \text{Respon Time sesuai standar}} \times 100\%$	
3.	Meningkatkan Sistem Manajemen Administrasi & Keuangan	1. Persentase pelayanan yang menggunakan Sistem Rujukan 2. Respon Time Administrasi dan Manajemen,	Persentase Jam	Meningkatkan pelayanan jaminan kesehatan Menilai akuntabilitas dan transparansi administrasi dan manajemen keuangan	Bagian Rekam Medik dan Keritraan Bagian Umum dan Keuangan	$\frac{\sum \text{Rujukan pasien yang datang berobat ke rs selama 1 bulan}}{\sum \text{Kunjungan pasien selama 1 bulan}} \times 100\%$ $\frac{\sum \text{Kecepatan waktu pemberian informasi tagihan pasien rawat inap yang disampling}}{\sum \text{pasien rawat inap yang disampling}} \times 100\%$	

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Alasan	Sumber Data	Cara Perhitungan	Penanggung Jawab
4.	Meningkatkan Sistem Manajemen Pelayanan Medik dan Keperawatan	1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Skor	Menilai mutu pelayanan rumah sakit melalui survey yang dilakukan oleh pihak eksternal	Bagian Keperawatan	$\frac{\sum \text{Nilai Interval konversi IKM}}{\sum \text{Titik jentis unit pelayanan yang dilakukan survey}} \times 100\%$	
5.	Meningkatnya kinerja Research Hospital	1. Penetapan RS sebagai RS Riset Nasional	Predikat	Meningkatkan mutu rumah sakit pendidikan dan penelitian	Bagian Pendidikan, Penelitian dan Mutu	$\frac{\sum \text{Hasil penelitian yang diterapkan dalam manajemen RS}}{\sum \text{Penelitian yang dilakukan di RS}} \times 100\%$	

1. Nama Unit Organisasi : Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan.
2. Tugas : Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang pelayanan kesehatan paripurna, pendidikan dan pelatihan.
3. Fungsi :
 1. Perumusan kebijakan teknis bidang pelayanan kesehatan paripurna, pendidikan dan penelitian sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
 2. Pemberian dukungan atas perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan bidang kesehatan paripurna, pendidikan dan penelitian;
 3. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian urusan umum dan keuangan;
 4. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian pelayanan bidang medik dan keperawatan;
 5. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian, penunjang dan pengembangan sumber daya manusia serta peningkatan mutu;
 6. Pembinaan kelompok Jabatan Fungsional;
 7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

4. Indikator Kinerja Utama :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Alasan	Sumber Data	Cara Perhitungan	Penanggung Jawab
1.	Meningkatnya Mutu Pelayanan Gawat Darurat	1. Persentase penanganan life-saving anak dan dewasa	Persentase	Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Kemendes RI No 129/Menkes/KK/II/2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal RS Type B non Pendidikan	$\frac{\sum \text{pasien yang mendapat Pertolongan live saving}}{\sum \text{pasien yg datang ke gawat darurat yg membutuhkan live saving}} \times 100\%$	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan.
		2. Response time di IGD	Menit	Standar Pelayanan Minimal (SPM)		$\frac{\sum \text{kumulatif waktu yg diperlukan sejak kedatangan pasien yang disampling sampai dilayani}}{\sum \text{sampling pasien}} \times 100\%$	
		3. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Persentase	Standar Pelayanan Minimal (SPM)		$\frac{\sum \text{kumulatif penilaian puas pasien gawat darurat yg disurvey}}{\sum \text{pasien gawat darurat yg disurvey}} \times 100\%$	
2.	Meningkatnya Mutu Pelayanan Rawat Jalan	1. Persentase dokter spesialis di poliklinik spesialis	Persentase	Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Kemendes RI No 129/Menkes/KK/II/2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal RS Type B non Pendidikan	$\frac{\sum \text{hari buka klinik spesialis oleh dokter spesialis dim waktu 1 bulan}}{\sum \text{seluruh hari buka klinik spesialis dim 1 bulan}} \times 100\%$	

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Alasan	Sumber Data	Cara Perhitungan	Penanggung Jawab
3.	Meningkatnya Mutu Pelayanan Rawat Inap	2. Response time di poliklinik spesialis	Menit	Standar Pelayanan Minimal (SPM)		$\frac{\sum \text{kumulatif waktu tunggu pasien rawat jalan yg disurvei}}{\sum \text{seluruh pasien rawat jalan yg disurvei}} \times 100\%$	
		3. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Persentase	Standar Pelayanan Minimal (SPM)		$\frac{\sum \text{kumulatif penilaian puas pasien rawat jalan yg disurvei}}{\sum \text{pasien rawat jalan yg disurvei}} \times 100\%$	
		1. Persentase ruang rawat inap yang memiliki dokter penanggung jawab	Persentase	Parameter Indikator Barber Jhonson (BJ)		$\frac{\sum \text{pasien dalam satu bulan yg mempunyai dokter sebagai penanggung jawab}}{\sum \text{seluruh pasien rawat inap dalam sebulan}} \times 100\%$	
		2. Efisiensi pelayanan:					
		a. Bed Occupancy Rate (BOR) (60 - 85 %)	Persentase			$\frac{\sum \text{hari rawat pada periode tertentu}}{\sum \text{TT tersedia} \times \sum \text{hari pada periode yg sama}} \times 100\%$	
		b. Length of Stay (LOS)	Hari			$\frac{\text{Total lama rawat pasien keluar (H+M)}}{\text{Total pasien keluar (H+M)}} \times 100\%$	
		c. Bed Turn Over (BTO)	Kali			$\frac{\text{Total pasien keluar (H+M)}}{\text{Total tempat tidur RS}} \times 100\%$	
		d. Turn Over Interval (TOI)	Hari			$\frac{\sum \text{TT tersedia} \times \sum \text{hari periode tertentu} - \text{Total hari rawat}}{\text{Total pasien keluar (H+ M) pada periode yg sama}} \times 100\%$	
		3. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Persentase				

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Alasan	Sumber Data	Cara Perhitungan	Penanggung Jawab
4	Meningkatnya Mutu Pelayanan Bedah-Sentral	1. Persentase medical-error yang terjadi	Persentase	Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Kemendes RI No 129/Menkes/K/II/2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal RS Type B non Pendidikan	$\frac{\sum \text{pasien yg mengalami medical error dalam 1 bulan}}{\sum \text{seluruh pasien yg dioperasi dalam 1 bulan}} \times 100\%$	
5	Meningkatnya Mutu Pelayanan Persalinan & Perinatologi	1. Jumlah kematian ibu dalam a. Pe b. Pre-eklampsia c. Sepsis	Persentase	Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Kemendes RI No 129/Menkes/K/II/2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal RS Type B non Pendidikan	$\frac{\sum \text{kematian pasien persalinan karena pendarahan, preeklamsi/eklamsia, patus lama, atau sepsis/meninging-meningitis}}{\sum \text{pasien persalinan dengan pendarahan, preeklamsi/eklamsia dan sepsis}} \times 100\%$	
6	Meningkatnya Mutu Pelayanan Perawatan Intensif	1. Persentase pasien yang kembali ke perawatan intensif dengan kasus yang sama < 72 jam	Persentase	Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Kemendes RI No 129/Menkes/K/II/2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal RS Type B non Pendidikan	$\frac{\sum \text{pasien yg kembali ke perawatan intensif dgn kasus yg sama < 72 jam dalam waktu 1 bulan}}{\sum \text{pasien yg dirawat di ruang intensif dalam waktu 1 bulan}} \times 100\%$	
7	Meningkatnya Mutu Pelayanan Penunjang Medis dan Non Medis	1. Persentase kegagalan pelayanan rontgent 2. Persentase kesalahan hasil laboratorium 3. Persentase pemenuhan kebutuhan darah 4. Waktu penyediaan rekam medik	Persentase Persentase Persentase Menit	Standar Pelayanan Minimal (SPM) Standar Pelayanan Minimal (SPM) Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Kemendes RI No 129/Menkes/K/II/2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal RS Type B non Pendidikan	$\frac{\sum \text{foto rusak yg tidak dapat dibaca dalam waktu 1 bulan}}{\sum \text{seluruh pemeriksaan foto dalam waktu 1 bulan}} \times 100\%$ $\frac{\sum \text{pasien yg diperiksa dalam 1 bulan} - (\sum \text{penyerahan hasil salah orang dim 1 bulan})}{\sum \text{seluruh pasien laboratorium dalam bulan tersebut}} \times 100\%$ $\frac{\sum \text{peminoran kebutuhan darah yang dapat dipenuhi dalam 1 bulan}}{\sum \text{seluruh pasien transfusi darah dalam 1 bulan}} \times 100\%$ $\frac{\sum \text{kumulatif penyediaan rekam medis rawat inap/rawat jalan}}{\sum \text{sampel penyediaan rekam medis yang diambil}} \times 100\%$	

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Alasan	Sumber Data	Cara Perhitungan	Penanggung Jawab
5	Kualitas mutu limbah cair sesuai dengan baku mutu	Persentase	<p>- Bersadarkan Kepmenkes RI no 1204/MENKES/SK/X/2004 tentang persyaratan Kesehatan Lingkungan RS dan PP No 18 tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah B3 bahwa setiap industri dan jasa yang menghasilkan limbah dari hasil kegiatannya harus melakukan pengelolaan terlebih dahulu sebelum dibuang ke lingkungan. RS sebagai sarana pelayanan publik yg kegiatannya menghasilkan limbah padat, medis, non medis, cair dan gas harus melakukan pengelolaan limbah cair di IPAL dan pembakaran sampah medis di incenerator guna meminimalkan dampak pencemaran lingkungan dari limbah yang dihasilkan</p>	Hasil uji pemeriksaan limbah cair	$\frac{\text{Hasil laboratorium pemeriksaan limbah cair: RSUD Tarakan sesuai baku mutu}}{\sum \text{seluruh pemeriksaan limbah cair}} \times 100\%$		
6	Kualitas mutu limbah padat yang dikelola sesuai dengan aturan	Persentase	<p>Karena semua sampah medis yang dihasilkan RS dibakar menggunakan incenerator</p>	Log book pencatatan pembakaran sampah medis	$\frac{\sum \text{limbah padat yang dikelola sesuai dengan standar prosedur operasional yang diamati}}{\sum \text{total proses pengolahan limbah padat yang diamati}} \times 100\%$		
7	Persentase peralatan medik yang memenuhi standar	Persentase	Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Kemenkes RI No 129/Menkes/KK/II/2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal RS Type B non Pendidikan	$\frac{\sum \text{alat medis kondisi baik dan rusak ringan (layak pakai)}}{\sum \text{alat medis keseluruhan}} \times 100\%$		
8	Persentase peralatan medik yang terkalibrasi	Persentase	Standar Pelayanan Minimal (SPM)		$\frac{\sum \text{alat medis kondisi baik dan rusak ringan yang terkalibrasi}}{\sum \text{alat medis kondisi baik dan rusak ringan wajib kalibrasi}} \times 100\%$		
9	Persentase pemenuhan kebutuhan peralatan medik	Persentase	Standar Pelayanan Minimal (SPM)		$\frac{\sum \text{alat medik keadaan baik} - \sum \text{alat medik keadaan rusak}}{\sum \text{Jumlah seluruh alat medik}} \times 100\%$		

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Alasan	Sumber Data	Cara Perhitungan	Penanggung Jawab
8	Meningkatnya Usia Harapan Hidup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Proporsi kelahiran yang ditolong tenaga kesehatan terlatih 2. Proporsi penduduk yang terinfeksi HIV lanjut yang memiliki akses pada obat-obatan anti retroviral 3. Tingkat kematian akibat malaria 4. Proporsi kasus TB yang terdeteksi, diobati dan sembuh dalam DOTS 5. Angka kesakitan (Morbiditas) 	<p>Persentase</p> <p>Persentase</p> <p>Persentase</p> <p>Persentase</p> <p>Persentase</p>	<p>Program pembangunan Provinsi Kalimantan Timur untuk periode 2013-2018 merupakan program prioritas yang secara spesifik dimaksudkan untuk mencapai sasaran RPJMD sesuai dengan sasaran kinerja</p>	<p>Rancangan Awal RPJMD Prov Kalimantan 2013-2018</p>	$\frac{\sum \text{tenaga dokter Sp. OG dokter umum terlatih (asutan persalinan normal) dan bidan yang memberikan pertolongan persalinan normal}}{\sum \text{seluruh tenaga yang memberikan pertolongan persalinan normal}} \times 100\%$ $\frac{\sum \text{Pasien HIV dengan ARV}}{\sum \text{Pasien HIV Total}} \times 100\%$ $\frac{\sum \text{pasien meninggal karena malaria}}{\sum \text{Pasien Malaria}} \times 100\%$ $\frac{\sum \text{pasien baru TB BTA + yang sembuh}}{\sum \text{pasien baru TB BTA = yang diobati}} \times 100\%$ $\sum \text{ kunjungan dalam 1 tahun}$	

1. Nama Unit Organisasi : **Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Kanudjoso Djatiwibowo Balikpapan**
2. Tugas : Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang pelayanan kesehatan paripurna, pendidikan dan pelatihan.
3. Fungsi :
 1. Perumusan kebijakan teknis bidang pelayanan kesehatan kesehatan paripurna, pendidikan dan penelitian sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
 2. Pemberian dukungan atas perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan bidang kesehatan paripurna, pendidikan dan penelitian;
 3. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian urusan umum dan keuangan;
 4. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian pelayanan bidang medik dan keperawatan;
 5. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian, penunjang dan pengembangan sumber daya manusia serta peningkatan mutu;
 6. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;
 7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

4. Indikator Kinerja Utama :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Alasan	Sumber Data	Cara Perthitungan	Penanggung Jawab
1.	Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat	1. Indeks Kepuasan Masyarakat	Prosentase	Mengetahui kualitas Pelayanan RS	Seksi Peningkatan Mutu	Kuesioner	Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Kanudjoso Djatiwibowo Balikpapan
		2. Waktu tanggap pelayanan dokter di IRD	Menit	Mengetahui kualitas pelayanan di IRD	Seksi Peningkatan Mutu	$\frac{\sum \text{kumulatif waktu yang diperlukan sejak kedatangan pasien yang disampling sampai dilayani dokter}}{\sum \text{Sampling pasien}} \times 100\%$	
		3. Waktu tunggu di Rawat Jalan	Menit	Mengetahui kualitas pelayanan di IRJA	Seksi Peningkatan Mutu	$\frac{\sum \text{kumulatif waktu tunggu pasien rawat jalan yang di survey}}{\sum \text{saluruh pasien rawat jalan}} \times 100\%$	
		4. Penggunaan Gelang Identitas	Prosentase	Mencegah terjadinya kesalahan terapi terhadap pasien	Komite PPI dan Pasien Safety	$\frac{\sum \text{Pasien rawat inap yang menggunakan gelang identifikasi dengan mencantumkan Nama Lengkap/No DMK/TKL Lahir}}{\sum \text{Semua Pasien yang dipusutkan untuk dirawat dan dapat menggunakan gelang identifikasi}} \times 100\%$	



1. Nama Unit Organisasi : **Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam.**
2. Tugas : **Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang pelayanan kesehatan jiwa dan narkoba, psikiotropika, serta zat adiktif lainnya (NAPZA).**
3. Fungsi :
 1. Perumusan Kebijakan teknis bidang pelayanan kesehatan jiwa dan narkoba, psikiotropika, serta zat adiktif lainnya (NAPZA) sesuai rencana strategis yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
 2. Pemberian dukungan atas perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian bidang pelayanan kesehatan jiwa dan narkoba, psikiotropika, serta zat adiktif lainnya (NAPZA).
 3. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian pelayanan.
 4. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian perawatan.
 5. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian perawatan.
 6. Penyelenggaraan urusan ketatausahaan.
 7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya
4. Indikator Kinerja Utama :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Alasan	Sumber Data	Cara Perhitungan	Penanggung Jawab
1.	Meningkatnya sarana prasarana pelayanan RS sesuai standar Rumah Sakit jiwa kelas A	1. Indeks kepuasan masyarakat terhadap infrastruktur rumah sakit		Untuk mengetahui tingkat bagian / pengguna pelayanan rumah sakit terhadap sarana dan prasarana yang telah disediakan	Perengkapan Rumah Rekam Medik	$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$	Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam.
2.	Meningkatnya Masyarakat terhadap Kesehatan jiwa	1. Presentase angka readmission ODMK dalam waktu <= 1 Bulan		Mengetahui upaya tindak lanjut dari pelayanan jiwa tingkat dasar	Rekam Medik	$100\% - \left(\frac{\text{Realisasi} - \text{Target}}{\text{Target}} \times 100\% \right)$	

1. Nama Unit Organisasi : Satuan Polisi Pamong Praja

2. Tugas : Memelihara dan menyelenggarakan ketertarikan dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah, Peraturan dan/atau Keputusan Gubernur.

3. Fungsi : 1. Penyusunan program dan pelaksanaan ketertarikan dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah, Peraturan dan/atau Keputusan Kepala Daerah;
2. Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketertarikan dan ketertiban umum di daerah;
3. Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur dan Keputusan Kepala Daerah;
4. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketertarikan dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah dengan aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan atau aparat lainnya.
5. Pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah, Peraturan dan/atau keputusan Kepala Daerah.

4. Indikator Kinerja Utama :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Alasan	Sumber Data	Cara Perhitungan	Penanggung Jawab
1.	Berkurangnya Pelanggaran Perda dan Perkada	1. Berkurangnya konflik sosial yang mengganggu masyarakat	Kejadian	Katim merupakan daerah yang masyarakatnya heterogen, baik suku, agama maupun budaya	Laporan Tibuntransmas	Bidang	Jumlah kejadian dalam setahun
		2. Berkurangnya aksi unjuk rasa terlebih yang mengarah kepada anarkis	Kejadian	Masyarakat Katim dengan keanekaragaman suku, agama dan budaya yang memiliki kelompok-kelompok kerukunan, Ormas, LSM dsb yang hidup dan berkembang mengikuti dinamika politik serta pemerintahan	Laporan Bidang Tibuntransmas	Bidang	Jumlah kejadian dalam setahun
		3. Berkurangnya pelanggaran dan penindakan terhadap pelanggaran Perda dan Perkada	Kejadian	Efektifitas penanganan dari dikeluarkannya produk hukum daerah yang meliputi berbagai sektor, sub sektor, program dan kegiatan berdampak terhadap aktifitas pemerintahan, dunia usaha, sosial, masyarakat dan	Laporan Bidang PHD		Jumlah kejadian dalam setahun
		4. Terbantunya kebencanaan / Penanganan Kebakaran	Kejadian	Intertitas kebencanaan yang terjadi baik karena faktor kesenjangan, kelalaian, alam dan susana tidak kondusif.	Laporan Bidang Linmas		Jumlah kejadian dalam setahun

1. Nama Unit Organisasi : **Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Kalimantan Timur (KPID).**
2. Tugas : **Menyelenggarakan administrasi ketelausahaan, menyusun sistem dan tataaksana penyiaran, melakukan dan melaksanakan administrasi perizinan siaran serta administrasi pengawasan siaran.**
3. Fungsi :
 1. Melaksanakan administrasi umum dan perlengkapan, keuangan, kepegawaian, penyusunan program, arsip, perpustakaan dan dokumentasi;
 2. Melaksanakan administrasi penyusunan sistem dan tataaksana siaran, perencanaan peraturan penyiaran daerah, menerima pengaduan masyarakat, pemberian sanksi siaran dan menyusun standar program siaran;
 3. Fasilitas penyelenggaraan rapat-rapat KPID;
 4. Mengkoordinasikan tugas-tugas PPNS dalam melakukan kegiatan perilaku penyiaran (P3) dan standar program siaran (SPS);
 5. Mengkoordinasikan peningkatan mutu dan profesionalisme sumber daya manusia bidang penyiaran, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
 6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua dan wakil ketua dan anggota KPID;
 7. Membuat laporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
4. Indikator Kinerja Utama :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Alasan	Sumber Data	Cara Perhitungan	Penganggung Jawab
1.	Meningkatkan pengaturan dan pengawasan isi siaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prosentase cakupan kebijakan pengaturan dan pengawasan atas isi siaran televisi dan radio 2. Prosentase pengaduan isi siaran televisi dan radio yang ditindaklanjuti oleh KPID Kaltim 3. Tingkat waktu pengawasan langsung siaran TV dan Radio 4. Banyaknya radio dan televisi yang diawasi KPID Kaltim 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya jumlah lembaga penyiaran yang harus diawasi 2. Meningkatnya jumlah pengaduan masyarakat 3. Meningkatnya penyelenggaraan penyiaran yang tidak mematuhi aturan P3 dan SPS 	1. Meningkatnya jumlah peraturan perundang-undangan siaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah Realisasi Sosialisasi P3SPS dibagi Pelanggaran dalam satu tahun dikali 100% 2. Jumlah pengaduan atas isi siaran televisi dan radio pada tahun ini dibandingkan dengan jumlah pengaduan pada tahun lalu 3. Jumlah waktu pengawasan langsung siaran TV dan Radio 4. Jumlah TV dan radio yang diawasi 	Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Kalimantan Timur (KPID).
2.	Meningkatkan kapasitas fungsi dan peran kelembagaan KPID Kaltim	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prosentase pengaduan dan pengawasan struktur sistem siaran yang ditindaklanjuti 2. Prosentase tindak lanjut proses pelayanan perizinan dalam lingkup wewenang KPID Kaltim 3. Tingkat pengembangan kebijakan struktur sistem siaran dalam lingkup wewenang KPID Kaltim 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya pelayanan oleh lembaga penyiaran dengan struktur sistem siaran 2. Meningkatnya jumlah pemohon ijin penyelenggaraan penyiaran 	Dana, SDM, Peraturan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah Pengaduan Masyarakat ditambah temuan KPI (LP illegal & IPP habis) dibagi tindak lanjut oleh KPI dikali 100% 2. Jumlah lembaga penyiaran yang memenuhi syarat dibandingkan dengan lembaga yang belum memenuhi syarat 3. Jumlah kebijakan struktur sistem siaran di lingkup KPID Kaltim 	

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Alasan	Sumber Data	Cara Perhitungan	Penanggung Jawab
3.	Meningkatkan pengawasan dan pengaturan struktur sistem siaran	1. Tingkat partisipasi masyarakat dalam menilai kualitas 2. Tingkat kemitraan KPID Katim dengan lembaga-lembaga lain 3. Tingkat cakupan wilayah kerja (coverage area) KPID Katim 4. Prosentase penyelesaian masalah-masalah terkait kelengkapan penyiaran		1. Kurangnya pengetahuan dan partisipasi masyarakat dalam menilai penyelenggaraan penyiaran 2. Meningkatnya kebutuhan kerjasama dengan lembaga lain terkait penyelenggaraan penyiaran 3. Meningkatnya permasalahan antar lembaga penyiaran	Dana, SDM, peraturan perundang-undangan	1. Kualitas SDM Penyiaran Lembaga Penyiaran (LP) dibagi Partisipasi masyarakat menilai SDM Penyiaran LP dikali 100% 2. Jumlah MOU KPID Katim dengan lembaga terkait lainnya 3. Jumlah lembaga penyiaran yang mengajukan izin penyiaran (IPP) 4. Jumlah penyelesaian masalah-masalah terkait kelengkapan	
4.	Meningkatkan dukungan layanan perkantoran dan teknis terhadap KPID Katim	1. Tingkat pelayanan administrasi dan manajemen ketatausahaan/perkantoran 2. Tingkat pelayanan administrasi dan manajemen keorganisasian 3. Tingkat pelayanan administrasi dan manajemen SDM 4. Tingkat pelayanan administrasi dan keuangan 5. Tingkat pelayanan administrasi dan manajemen sarana dan prasarana		1. Tingginya tingkat kebutuhan layanan perkantoran dan dukungan teknis terhadap KPID Katim	Dana, SDM, sarana dan prasarana pendukung	1. Jumlah pelayanan administrasi dan manajemen ketatausahaan/perkantoran 2. Jumlah pelayanan administrasi dan manajemen keorganisasian 3. Jumlah pelayanan administrasi dan manajemen SDM 4. Jumlah pelayanan administrasi dan keuangan 5. Jumlah pelayanan administrasi dan manajemen sarana dan prasarana	

1. Nama Unit Organisasi : **Sekretariat DPP KORPRI.**
2. Tugas : Melaksanakan koordinasi dan pemberian dukungan administrasi kepada Dewan Pengurus Provinsi KORPRI Kalimantan Timur.
3. Fungsi :
 1. Mengkoordinasikan kegiatan Dewan Pengurus Provinsi KORPRI Kalimantan Timur;
 2. Membantu Pengurus DPP KORPRI Provinsi dalam melaksanakan tugasnya;
 3. Memimpin kegiatan Sekretariat DPP KORPRI Provinsi;
 4. Memberikan pertimbangan dan sarana yang dipandang perlu kepada Pengurus DPP KORPRI Provinsi tentang langkah-langkah atau tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam mencapai tujuan KORPRI;
 5. Merencanakan dan melaksanakan segala kegiatan di bidang umum, pengembangan sumber daya manusia dan kesejahteraan, hukum dan hubungan masyarakat;
 6. Pembinaan kelompok jabatan fungsional;
 7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya dan fungsinya.

4. Indikator Kinerja Utama :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Alasan	Sumber Data	Cara Perhitungan	Penanggung Jawab
1.	Peningkatan kepedulian terhadap masalah social bagi anggota KORPRI	1. Persentase bantuan social bagi anggota KORPRI	Persentase	Memberikan pengthargaan atas pengabdian dan perhatian bagi Anggota KORPRI	1. Sosialisasi & Penyuluhan 2. Seni & Musik 3. Olahraga	Jumlah Kegiatan yang terlaksana Jumlah Kegiatan yang direncanakan x 100%	
2.	Meningkatnya kesejahteraan bagi anggota KORPRI	1. Persentase pelayanan kesehatan pada PPK - PNS bagi anggota KORPRI Prov dan Keluarganya	Prosentase	Memberikan kemudahan dalam memenuhi kebutuhan Kesehatan Anggota KORPRI Prov	Pusat Pelayanan Kesehatan KORPRI Prov Kalimantan	Jumlah Anggota yg dilayani Jumlah Anggota yang membutuhkan Pelayanan x 100%)	
		2. Persentase Bantuan Hukum bagi anggota KORPRI	Prosentase	Membantu Pendampingan anggota KORPRI yang tersangkut hukum	Bantuan hukum (pendampingan)	Jumlah Anggota yg diberi Bantuan Bankum Jumlah Anggota yang membutuhkan bantuan hukum x 100%)	
		3. Persentase Bantuan Perumahan bagi anggota KORPRI	Prosentase	Mensjjahterakan Anggota KORPRI dan Keluarganya	Penyelesaian Perumahan Serifikat Perumahan	Jumlah Anggota yg dibantu Perumahan Jumlah Anggota yang membutuhkan Perumahan x 100%)	

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Alasan	Sumber Data	Cara Perhitungan	Penanggung Jawab
		4 Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (Anggota KORPRI)	Prosentase	Kepuasan Anggota KORPRI	Laporan dari Unit Pelayanan	Survei IKM	

1. Nama Unit Organisasi : **Badan Penanggulangan Bencana Daerah.**

2. Tugas :
1. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
 2. Menetapkan standarsasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 3. Menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
 4. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
 5. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
 6. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
 7. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 8. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. Fungsi :
1. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien,
 2. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

4. Indikator Kinerja Utama :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Alasan	Sumber Data	Cara Perhitungan	Penanggung Jawab
1	Terwujudnya kesadaran , kemampuan dan kesiapsiagaan aparaturn pemerintah dan masyarakat dalam upaya pengurangan risiko bencana melalui peningkatan kapasitas di kabupaten/kota	1 Rasio penurunan indeks risiko bencana 2 Rasio peningkatan jumlah desa/keurahan/ kampung rawan bencana yang mendapat/memperoleh informasi peringatan dini bencana	Persentase	Mengukur Tingginya indeks rawan bencana di daerah	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) di BNPB Jakarta	IRBI Saat ini IRBI Lalu $\times 100\%$	Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
2	Terwujudnya masyarakat yang tangguh dalam menghadapi bencana melalui sistem penanggulangan bencana yang efektif dan efisien	1 Respon Time tanggap darurat 2 Persentase Korban Bencana yang diselamatkan	Persentase	Mengukur ketepatan, kecepatan dalam penanganan bencana	- Data Pusdalops-PB - Data BPBD Kab/kota	$\frac{\Sigma \text{korban bencana}}{\Sigma \text{penduduk yg terdampak bencana}} \times 100\%$	
			Persentase	Mengukur sistem informasi yang akurat dan terpercaya	- Data Pusdalops-PB - Data BPBD Kab/kota	$\frac{\Sigma \text{potensi bencana}}{\Sigma \text{kejadian bencana}} \times 100\%$	

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Alasan	Sumber Data	Cara Perhitungan	Penanggung Jawab
3	Terselenggaranya penanggulangan bencana untuk semua aspek pelayanan masyarakat	<p>1 Menurunnya penyandang masalah sosial pada masa pasca bencana</p> <p>2 Pemulihan perekonomian masyarakat pasca bencana</p> <p>3 Prosentase Penilaian Kerusakan dan Kerugian serta pemulihan kebutuhan manusia</p>	<p>Persentase</p> <p>Persentase</p> <p>Persentase</p>	<p>Bahan kajian untuk pengentasan kemiskinan masyarakat pada pasca bencana di daerah</p> <p>Perlu nya rencana aksi penanganan pemulihan pasca bencana</p> <p>Pertunya peningkatan SDM dalam rangka penilaian kerusakan, kerugian dan pemulihan kebutuhan masyarakat</p>	<p>Kajian Satgas JITU-PASNA dan Laporan BPBD Kab/kota</p> <p>Hasil JITU - PASNA</p> <p>Hasil JITU - PASNA</p>	<p>Penanganan Penyandang masalah kesejahteraan sosial</p> $\frac{\sum \text{PMKS yg ditangani}}{\sum \text{PMKS yg ada}} \times 100\%$ <p>Pertumbuhan PRDB :</p> $\frac{\text{PRDB (t+1)} - \text{PRDB (t)}}{\text{PRDB (t)}} \times 100\%$ $\frac{\sum \text{SDM yg dilatih}}{\sum \text{SDM yg ada diwilayah kab/kota}} \times 100\%$	



1. Nama Unit Organisasi : **Badan Pembangunan Perbatasan Daerah**

2. Tugas : Melakukan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah pengembangan wilayah perbatasan dan sumber daya, peningkatan infrastruktur, pembinaan ekonomi dan dunia usaha, pembinaan lembaga sosial dan budaya serta kesekretariatan.

3. Fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pengelolaan kawasan Perbatasan, Pedalaman dan Daerah Terpencil sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
2. Pemberian dukungan atas perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang Pengelolaan Kawasan Perbatasan, Pedalaman dan Daerah Terpencil;
3. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang pengembangan wilayah perbatasan dan sumber daya;
4. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang peningkatan pembangunan infrastruktur;
5. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang pembinaan ekonomi dan dunia usaha;
6. perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang pembinaan lembaga sosial dan budaya;
7. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
8. Pembinaan kelompok jabatan fungsional;
9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Indikator Kinerja Utama :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Alasan	Sumber Data	Cara Perhitungan	Penanggung Jawab
1.	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	1. Pertumbuhan Ekonomi		Perwujudan Misi II : Mewujudkan daya saing yang berkerakyatan Berbasis sumberdaya alam dan Energi Terbarukan	RPJMD Prov. Kaltim Tahun 2013 - 2018	_____ x 100%	Badan Pembangunan Perbatasan Daerah
2.	Menurunnya Indeks Ketimpangan Regional	1. Indeks Ketimpangan Regional		Perwujudan Misi III : Mewujudkan infrastruktur Dasar yang berkualitas bagi masyarakat secara merata	RPJMD Prov. Kaltim Tahun 2013 - 2018	_____ x 100%)	
3.	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat	1. Indeks Kepuasan Masyarakat		Perwujudan Misi IV : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan dan Berorientasi pada pelayanan Publik	RPJMD Prov. Kaltim Tahun 2013 - 2018	_____ x 100%)	

1. Nama Unit Organisasi : **Biro Pemerintahan Umum.**

2. Tugas : 1. Merumuskan kebijakan, Koordinasi pembinaan dan pemberian bimbingan serta pengendalian teknis dibidang administrasi pemerintahan, penyelenggaraan daerah, administrasi pemerintahan, pembantuan serta kependudukan

3. Fungsi : 1. Perumusan kebijakan teknis dibidang pemerintahan umum sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan oleh Pemerintahan Daerah;
2. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis dibidang pemilu dan pejabat Negara;
3. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis dibidang penyelenggaraan pemerintahan daerah;
4. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis dibidang administrasi pemerintahan;
5. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis dibidang kependudukan;
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Indikator Kinerja Utama :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Alasan	Sumber Data	Cara Perhitungan	Penganggung Jawab
1	Meningkatnya kualitas LPPD	Predikat LPPD	Skor	- Hasil Evaluasi LPPD dijadikan dasar untuk melakukan pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi - Memotivasi daerah lebih meningkatkan kinerja dalam kapasitas sebagai pelayan publik	- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan pemerintahan Daerah kepada masyarakat (pasal 3 ayat 2)	3<ST<4=Sangat Tinggi, 2<T<3=Tinggi, 1<S<2=Sedang, 0<R<1=Rendah	Biro Pemerintahan Umum.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Alasan	Sumber Data	Cara Perhitungan	Penanggung Jawab
2	Terselenggaranya SIAK dan NIK Nasional	Presentase administrasi kependudukan kab/kota yang memenuhi kategori lebih dari atau sama dengan " Baik"	Presentase	Meningkatkan motivasi penyelenggaraan kependudukan kab/kota dalam rangka tertib administrasi kependudukan	1. Quisioner ke dinas kependudukan dan pencatatan sipil kab/kota 2. Monitoring ke lapangan	Pembobotan penilaian : 1 Rumusan penghitungan kriteria utama (75%) : Bobot = 75% nilai masing-masing variabel 40 - 100 Nilai x bobot = nilai akhir 2 Rumusan penghitungan kriteria penunjang : Bobot = 25% nilai masing-masing variabel 40 - 100 nilai x bobot = nilai akhir 3 Kategori 80 keatas = Sangat Baik 70 - 80 = Baik 61 - 70 = Sedang 50 - 60 = kurang	

1. Nama Unit Organisasi : Biro Hukum.

2. Tugas : Merumuskan kebijakan, Koordinasi pembinaan dan pemberian bimbingan serta pengendalian teknis di bidang peraturan perundang-undangan, bantuan hukum dan hak asasi manusia, pembinaan dan pengawasan produk hukum, serta dokumentasi dan informasi hukum.

3. Fungsi :
1. Perumusan kebijakan teknis di bidang hukum dan perundang-undangan sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan oleh Pemerintahan Daerah;
2. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis dibidang peraturan perundang-undangan;
3. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis dibidang bantuan hukum dan hak asasi manusia;
4. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis dibidang pembinaan dan pengawasan produk hukum;
5. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis dibidang dokumentasi dan informasi hukum;
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Indikator Kinerja Utama :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Alasan	Sumber Data	Cara Perhitungan	Penanggung Jawab
1.	Terwujudnya Produk Hukum Daerah yang sesuai dengan norma dan azas HAM	Jumlah Produk Hukum yang ditetapkan	dokumen	Mengukur produk hukum yang dihasilkan tidak melanggar norma dan azas HAM sehingga dalam pelaksanaannya tidak menimbulkan konflik dan keresahan dalam masyarakat.	Jumlah Produk Hukum yang telah ditetapkan dan didokumentasikan	Jumlah produk hukum yang masuk $\times 100\%$ Jumlah produk hukum yang diselesaikan	Biro Hukum, Jawab
2.	Terwujudnya Bantuan Hukum dan Aparatur/Masyarakat sadar hukum dalam penegakan HAM	Persentase penyelesaian advokasi/bantuan hukum	Persentase	Mengukur gugatanengketa yang terjadi antara Pemerintah dengan masyarakat/pihak lain yang masuk dalam ranah hukum serta Masih rendahnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat berkaitan dengan HAM sehingga sering terjadi pelanggaran hukum yang berdampak pada masyarakat oleh Pemerintah maupun oleh masyarakat.	Laporan penyelesaian advokasi/bantuan hukum yang telah dilakukan	Jumlah Perkara yang diselesaikan $\times 100\%$ Jumlah perkara yang masuk	
3.	Terwujudnya Pembinaan Produk Hukum dan Hukumi di Kabupaten Kota	Persentase produk hukum daerah yang dikalifikasi dan dievaluasi	Persentase	Mengukur peraturan perundangan yang dihasilkan oleh Kab/Kota sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi	Jumlah Produk hukum Kabupaten/Kota yang dikalifikasi dan dievaluasi	Jumlah produk hukum yang di kalifikasi dan evaluasi $\times 100\%$ Jumlah seluruh produk hukum kab/kota	

1. Nama Unit Organisasi : **Biro Perbatasan, Penataan Wilayah dan Kerjasama.**

2. Tugas : Merumuskan Kebijakan, Koordinasi pembinaan dan pemberian bimbingan serta pengendalian teknis di bidang perbatasan, penataan wilayah serta kerjasama dalam dan luar negeri.

3. Fungsi : 1. Perumusan kebijakan teknis di bidang perbatasan, penataan wilayah serta kerjasama sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan oleh Pemerintahan Daerah;
2. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang perbatasan;
3. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang penataan wilayah;
4. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang kerjasama luar dan dalam negeri;
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Indikator Kinerja Utama :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Alasan	Sumber Data	Cara Perhitungan	Penanggung Jawab
1.	Tertindakannya efisiensi dan efektifitas keseimbangan pembangunan kerjasama antar daerah	1 Jumlah perjanjian kerjasama (MoU)	MoU	Mengukur tingkat kepuasan masyarakat dalam pelayanan administrasi khususnya dalam pembuatan MoU dan surat izin perjalanan dinas ke luar negeri	RENSTRA BIRO 2013 - 2018 Perjanjian kerjasama	Jumlah Perjanjian kerjasama (MoU) yang terealisasi	Biro Perbatasan, Penataan Wilayah dan Kerjasama.
2.	Meningkatnya kepastian batas wilayah antar kab/kota dan provinsi	1 Jumlah Penegasan batas yang disepakati	DOK	Mengukur keberhasilan fasilitasi dan penyelesaian sengketa batas wilayah serta mengukur jumlah PBU yang telah terpasang	RENSTRA BIRO 2013 - 2018 Katalog Tapal Batas	Jumlah Berita Acara kesepakatan yang diandatangani	
3.	Tertfasiliasinya penataan wilayah	1 Jumlah Rekomendasi dalam pembentukan DOB dan Kecamatan - DOB - Kec	Rekomendasi	Mengukur Efektifitas dalam memberikan rekomendasi penataan wilayah	RENSTRA BIRO 2013 - 2018 Katalog Kode Data Wilayah Administrasi Prov. Kaltim	Jumlah Rekomendasi	
4.	Tertindakannya pembakuan nama rupa bumi, serta administrasi wilayah diseluruh kalim	1 Pembakuan nama rupa bumi dan kode data	Dokumen	Mengukur kelengkapan kode data dan pengelolaan toponimi	RENSTRA BIRO 2013 - 2018 Laporan Hasil Akhir Kegiatan Prose Pembentukan Pemekaran Wilayah	Jumlah Dokumen	

1. Nama Unit Organisasi : **Biro Pembangunan Daerah.**

2. Tugas : Merumuskan Kebijakan, Koordinasi pembinaan dan pemberian bimbingan serta pengendalian teknis perencanaan program Setda, pengendalian pembangunan daerah, analisis dan pengkajian pembangunan.

3. Fungsi :
1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pembangunan daerah sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan oleh Pemerintahan Daerah;
2. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang perencanaan program Setda;
3. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang pengendalian pembangunan daerah;
4. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang analisis dan pengkajian pembangunan;
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Indikator Kinerja Utama :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Atasan	Sumber Data	Cara Perhitungan	Penanggung Jawab
1.	Terwujudnya pelayanan administrasi dan koordinasi perencanaan, penganggaran, dan pembangunan secara baik	1. Prosentase Pembangunan Capaian	Hasil	Fungsi Biro Bangda sesuai dengan Pergub Kaltim No.73 Tahun 2009		Total APBD - Total Realisasi	Biro Pembangunan Daerah.
2.	Jumlah Lelang Yang Dilakukan Melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) Provinsi Kalimantan Timur	1 Jumlah Lelang	Persentase	Fungsi Biro Bangda sesuai dengan Pergub Kaltim No.37 Tahun 2013		Lelang Barang/Jasa + Lelang Konsultasi + Lelang Konstruksi + Lelang Jasa Lainnya	
3.	Berkurangnya Jumlah Sanggahan Lelang	1 Persentase Jumlah Sanggahan	Persentase	Fungsi Biro Bangda sesuai dengan Pergub Kaltim No.37 Tahun 2013		$Y = X_{n+1} < X_n$	

1. Nama Unit Organisasi : **Biro Perencanaan.**

2. Tugas : Merumuskan kebijakan, Koordinasi pembinaan dan pemberian bimbingan serta pengendalian teknis sarana perekonomian, industri dan jasa, serta produksi daerah dan sumber daya alam.

3. Fungsi :
1. Perumusan kebijakan teknis di bidang perekonomian sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan oleh Pemerintahan Daerah;
2. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis dibidang sarana perekonomian;
3. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis dibidang industri dan jasa;
4. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis dibidang produksi daerah dan sumber daya alam;
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Indikator Kinerja Utama :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Alasan	Sumber Data	Cara Perhitungan	Penanggung Jawab
1.	Terwujudnya koordinasi bidang perekonomian	1 Nilai Inflasi Daerah	Nilai	Mengukur laju pertumbuhan inflasi di daerah	- Data Bank Indonesia - Data BPS - Data inflasi dari Kab/Kota - Instruksi Mendagri No. 027/1696/SJ tentang Menjaga ketertangkauan barang dan jasa di daerah	Inflasi di Kota Balikpapan, Kota Samarinda, Kabupaten Paser dan Kabupaten Penajam Paser Utara	Biro Perencanaan.

1. Nama Unit Organisasi : **Biro Sosial.**

2. Tugas : Merumuskan kebijakan, Koordinasi pembinaan dan pemberian bimbingan serta pengendalian teknis mental dan spiritual, pendidikan, seni dan budaya serta kepemudaan dan kemasyarakatan.

3. Fungsi : 1. Perumusan kebijakan teknis di bidang sosial sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan oleh Pemerintahan Daerah;

2. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis dibidang mental dan spritual;

3. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis dibidang pendidikan, seni dan budaya;

4. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis dibidang kepemudaan dan kemasyarakatan

5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Indikator Kinerja Utama :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Alasan	Sumber Data	Cara Perhitungan	Penanggung Jawab	
1.	Meningkatnya fungsi perencanaan perumusan kebijakan kepala daerah bidang kesejahteraan Rakyat	1. Menurunnya Tingkat Kemiskinan	Persentase	Mengukur kinerja Daerah menyelenggarakan koordinasi dan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan daerah	Permerintah dalam tugas penanggulangan kemiskinan program penanggulangan kemiskinan	Buku rencana aksi provinsi Kalimantan timur 2013 - 2018	Survei Sosial ekonomi Nasional (susenas) yang dilaksanakan oleh BPS	Biro Sosial.

1. Nama Unit Organisasi : **Biro Organisasi.**

2. Tugas : Merumuskan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan bimbingan serta pengendalian bidang kelembagaan, ketatalaksanaana, pendayagunaan aparatur, dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

3. Fungsi :

1. perumusan kebijakan bidang organisasi sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
2. perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian bidang kelembagaan;
3. perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian bidang ketatalaksanaan;
4. perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian bidang pendayagunaan aparatur;
5. perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian bidang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
6. penyelenggaraan tata usaha biro;
7. pembinaan kelompok jabatan fungsional;
8. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

4. Indikator Kinerja Utama :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Alasan	Sumber Data	Cara Perhitungan	Penanggung Jawab
1.	Terwujudnya Organisasi tataletaksana dan Pendayagunaan aparatur yang profesional, rasional, efektif, efisien, dan akuntabel	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prosentase Indikator SPM yang diterapkan oleh SKPD Provinsi dan Kab/Kota 2. Skor IKM rata-rata unit Pelayanan (Kategori Sangat baik) 3. Prosentase SKPD dan Kab/Kota yang telah dievaluasi SOTK : 	<p>Persentase</p> <p>Skor</p> <p>Persentase</p>	<p>- Mengukur efektifitas organisasi dalam meningkatkan pelayanan</p> <p>- Mengukur Indikator SPM penerapan</p>	<p>Laporan hasil capaian SPM</p> <p>- Laporan dari unit layanan</p> <p>- Laporan peningkatan kualitas layanan</p>	<p>Rumus = Jumlah Indikator SPM yang diterapkan / Jumlah Keseluruhan Indikator SPM X 100%</p> <p>Survey IKM</p> <p>Rumus = Jumlah SKPD dan Kab/kota yang telah dievaluasi SOTK / Jumlah keseluruhan SKPD dan Kab/kota X 100 %</p>	Biro Organisasi

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Alasan	Sumber Data	Cara Perhitungan	Penanggung Jawab
4.	Prosenstase SKPD yang melakukan Analisis beban kerja dalam rangka penyusunan formasi jabatan	Persentase	Mengukur Jumlah Kebutuhan Pegawai, Menyempurnakan Tugas Jabatan, Menyempurnakan (Redesign) Struktur Organisasi, Menentukan Standar Waktu (Standard Time) Tugas dan Aktivas,	- Laporan hasil Anjab - Laporan Penyusunan Formasi Jabatan	Rumus = Jumlah SKPD yang melakukan Analisis beban kerja / Jumlah keseluruhan SKPD X 100 %		
5.	Prosenstase SKPD yang dinilai Akuntabel (CC)	Persentase	Mengukur keberhasilan penerapan SAKIP di SKPD.	Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Inspektorat Prov. Kaltim	Rumus = Jumlah SKPD Nilai Akuntabilitas (CC) / Jumlah keseluruhan SKPD X 100%		

1. Nama Unit Organisasi : **Biro Keuangan**

2. Tugas : Merumuskan kebijakan, Koordinasi pembinaan dan pemberian bimbingan serta pengendalian teknis di bidang anggaran, perbendaharaan, akuntansi, dan analisis kebijakan keuangan daerah.

3. Fungsi :
1. Perumusan kebijakan teknis di bidang keuangan sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan oleh Pemerintahan Daerah;
2. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis dibidang anggaran;
3. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis dibidang perbendaharaan;
4. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis dibidang akuntansi;
5. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis dibidang bina administrasi keuangan daerah;
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Indikator Kinerja Utama :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Alasan	Sumber Data	Cara Perhitungan	Penanggung Jawab
1.	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Terbik dan Akuntansi	1. Opini terhadap Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah Oleh BPK	Opini	Mengukur Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi	Hasil Audit BPK	1. Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan 2. Penilaian atas keandalan sistim pengendalian intern yang berdampak material terhadap laporan keuangan 3. Penilaian Terhadap Penyajian atas Laporan Keuangan secara keseluruhan	Biro Keuangan
2.	Terwujudnya Ketepatan Waktu Penyusunan APBD	1. Ketepatan Waktu	Tepat/ Tidak	Mengukur Ketepatan Waktu Penyusunan APBD	Dokumen APBD	Ketepatan Waktu Penyusunan APBD paling lambat Per 31 Desember	

1. Nama Unit Organisasi : Biro Umum.

2. Tugas : Merumuskan kebijakan, Koordinasi pembinaan dan pemberian bimbingan serta pengendalian teknis di bidang administrasi umum, keuangan Setda, rumah tangga, sandi dan telekomunikasi.

3. Fungsi :
1. Perumusan kebijakan teknis di bidang umum sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan oleh Pemerintahan Daerah;
2. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis dibidang administrasi umum;
3. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis dibidang keuangan Setda;
4. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis dibidang rumah tangga;
5. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis dibidang sandi dan telekomunikasi;
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Indikator Kinerja Utama :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Alasan	Sumber Data	Cara Perhitungan	Penanggung Jawab
1.	Terwujudnya Administrasi Umum pelayanan	1. Skor IKM rata-rata tingkat Pelayanan Administrasi Umum Setda Prov. Kaltim	Skor	Untuk Mengukur tingkat Kepuasan terhadap pelayanan administrasi ketatausahaan Biro di lingkungan Setda Prov. Kaltim	Biro Umum	Survey IKM	Biro Umum.
		2. Skor IKM rata-rata tingkat Pelayanan Administrasi Keuangan, Perjalanan Dinas	Skor	Untuk Mengukur tingkat Kepuasan pelayanan Administrasi Keuangan dan Pengelolaan Keuangan dan Perjalanan Dinas	Biro Umum	Survey IKM	
		3. Skor IKM rata-rata tingkat Pelayanan Rumah Tangga Sekretariat dan Pimpinan Daerah serta Tamu Pemerintah Daerah	Skor	Untuk Mengukur tingkat Kepuasan pelayanan Rumah Tangga sekretariat setda dan Pimpinan Daerah serta Tamu Pemerintah Daerah	Biro Umum	Survey IKM	
		4. Skor IKM rata-rata tingkat Pelayanan Persandian dan Telekomunikasi dalam penyampaian Informasi/Komunikasi yang Baik	Skor	Untuk Mengukur Tingkat Kepuasan Terhadap Persandian dan Telekomunikasi dalam penyampaian Informasi/ Komunikasi di lingkungan Prov. Kaltim	Biro Umum	Survey IKM	

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BPO HUKUM,

H. SUKOTO, SH
PEMIBINA UTAMA MUDA
NIP. 19620527 198503 1 006

Samarinda, 5 Oktober 2015
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

td

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK